

BAB 3

DAMPAK PELANGGARAN HAK CIPTA PRODUK AS OLEH CHINA TERHADAP INDUSTRI HAK CIPTA AS

Hubungan antara AS-China khususnya hubungan dagang terkait hak cipta mulai terganggu sejak masuknya China dalam keanggotaan WTO pada akhir 2001 hingga akhirnya pemerintah AS memperkarakan pelanggaran dan pembatasan akses pasar produk hak cipta AS oleh China ke DSB WTO pada tahun 2007. Hal tersebut menandakan bahwa salah satu pihak dari mitra dagang merasa dirugikan dan tidak puas dengan segala upaya dan *output* yang dihasilkan dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Pemerintah AS merasa dirugikan dan tidak puas dengan upaya pemerintah China dalam menangani masalah perlindungan dan akses pasar produk hak cipta AS. Pemerintah AS pun telah berupaya keras untuk melindungi industri hak ciptanya dari gerusan pembajakan yang dilakukan oleh China. Upaya kerjasama yang terjalin antar kedua negara pun dinilai tidak mampu memberikan hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Kerugian yang tiap tahunnya selalu dialami oleh industri AS membuat AS bersikap kritis pada setiap upaya pemerintah China terkait sikapnya dalam melindungi hak cipta.

Untuk itu, bab ini secara khusus akan membahas bagaimana pelanggaran HaKI terkait pembajakan produk hak cipta AS oleh China mempengaruhi *wealth-power* AS melalui kerugian yang diderita industri hak ciptanya. Adapun pembahasan pada bab ini diberikan batasan tahun 2001 sampai 2007 dikarenakan tahun 2001 merupakan tahun masuknya China ke WTO, sementara itu dipilihnya 2007 sebagai akhir periode karena, sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada tahun 2007 AS memperkarakan masalah pelanggaran HaKI terkait hak cipta produk AS oleh China ke WTO yang merupakan bukti paling jelas upaya keras AS mengatasi masalah pelanggaran hak cipta yang telah menggerogoti industri hak ciptanya sejak lama.

Selain itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana HaKI menjadi penting bagi suatu negara, bab ini juga akan memaparkan perkembangan permasalahan HaKI di dunia internasional. Dari dimulainya

internasionalisasi isu HaKI hingga dimasukkannya peraturan HaKI ke dalam WTO.

Analisis pada bab ini akan dititik beratkan pada faktor industri dan teknologi yang merupakan sumber bagi penciptaan *wealth-power* suatu negara. Di mana sebagaimana disebutkan sebelumnya, *wealth-power* merupakan hal yang dicari oleh suatu negara dalam melakukan hubungan dagang.

3.1 Internasionalisasi Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hal yang paling sering dan mendasar dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari aktivitas pagi hari, memasak dengan menggunakan kompor, membaca koran, mengendarai mobil, mendengarkan lagu di sepanjang perjalanan, menonton film, hingga pakaian yang kita pakai sehari-hari, seluruhnya melekat dengan kekayaan intelektual. Kompor, koran, mobil, lagu, film, dan banyak lainnya, tidaklah muncul begitu saja, melainkan telah melalui sebuah proses mulai dari menuangkan ide, riset, hingga menjadi suatu wujud yang dapat dinikmati oleh khalayak umum.

Uraian di atas tentu dapat memberikan sekilas pesan tentang pentingnya untuk melindungi hasil karya ciptaan seseorang melalui suatu hak privat berupa hak atas kekayaan intelektual. Untuk itu, bagian ini selanjutnya akan membahas mengenai ruang lingkup HaKI, dan pembahasan mendalam pada hak cipta, pelanggaran hak cipta di China, hingga kerugian yang dialami AS atas pembajakan produk-produk AS oleh China. Secara lebih jelas mengenai HaKI akan dijabarkan sebagai berikut.

Keberadaan suatu institusi internasional tidak hanya mendukung menipisnya batas-batas antar negara, tetapi juga mendukung menipisnya hambatan-hambatan dalam dunia ekonomi, khususnya perdagangan.⁹² Salah satu contohnya adalah berdirinya WTO. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia antar pemerintah secara resmi menggantikan GATT (didirikan tahun 1948 sebagai bagian dari kesepakatan di Bretton Woods, AS) sejak 1 Januari 1995.

Adalah Putaran Uruguay yang merupakan putaran terakhir dan terpanjang (September 1986-April 1994) dalam GATT, yang mengarahkan pada

⁹² Budi Winarno. *Globalisasi dan Krisis Ekonomi*. (Jakarta: MedPress, 2007). Hal 18.

pembentukan WTO, dan untuk pertama kalinya perundingan dalam Putaran Uruguay tersebut membahas dan merundingkan aturan main dalam bidang/ masalah-masalah baru (*new issue*) yang belum pernah ditangani oleh GATT sebelumnya dan dianggap mempunyai dampak terhadap perdagangan internasional, yaitu masalah-masalah yang berkaitan di bidang jasa, kebijakan investasi, dan hak atas kekayaan intelektual.⁹³

Adapun 15 subjek/ topik yang dirundingkan dalam Putaran Uruguay adalah sebagai berikut:⁹⁴ tarif, hambatan non-tarif, produk sumber daya alam, tekstil dan pakaian jadi, pertanian, produk-produk tropis, pasal-pasal GATT, kode-kode Putaran Tokyo⁹⁵, anti-*dumping*, subsidi, kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu, aturan investasi, penyelesaian sengketa, sistem GATT, jasa.

Sejak itu WTO menyerap dan menyempurnakan lagi aturan-aturan yang telah dibangun oleh GATT.⁹⁶ Misalnya saja dalam hal wewenang, WTO memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks yaitu mengatur perdagangan barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual. Sedangkan GATT saat itu hanya mengatur perdagangan barang.

Sebagai organisasi internasional yang baru, WTO berupaya mewujudkan perluasan cakupannya yang lebih mengglobal, dengan tujuan utamanya adalah:⁹⁷ *pertama*, mendorong arus perdagangan antar negara, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. *Kedua*, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. *Ketiga*, untuk penyelesaian sengketa dagang mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Meskipun sudah ada persetujuan WTO yang telah disepakati anggotanya, masih ada kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi

⁹³ H.S. Kartadjoemena. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. (Jakarta: UI Press, 1997). Hal 7.

⁹⁴ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2006). Hal 6.

⁹⁵ Yang termasuk dalam kode-kode Putaran Tokyo adalah pemberian subsidi dan tindakan imbalan, hambatan teknis perdagangan, prosedur lisensi impor, pengadaan barang pemerintah, penilaian pabean, anti-*dumping*, pengaturan daging sapi, pengaturan produk-produk susu olahan secara internasional, dan pengadaan pesawat sipil. *Ibid.*

⁹⁶ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri (2005), *op. cit.*, hal 2-3.

⁹⁷ *Ibid.*

dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama.

WTO pada dasarnya juga merupakan serangkaian kesepakatan dari negara anggota untuk mewujudkan persaingan dagang yang lebih sehat sesuai dengan prinsip-prinsip WTO, yaitu *pertama*, perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang (*Most Favored Nation*), berdasarkan prinsip ini negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasi mitra dagangnya. Misalnya, keringanan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. *Kedua*, perlakuan nasional (*National Treatment*), negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal, paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Perlakuan yang meliputi bidang barang, jasa, dan HaKI tersebut diterapkan saat suatu produk memasuki pasar domestik. *Ketiga*, transparansi, negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/ transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.

Untuk itu, misalnya saja jika ada negara anggota yang tidak mematuhi prinsip-prinsip pada perjanjian WTO, mereka bisa diadukan oleh negara anggota lainnya karena merasa dirugikan, serta mendapat sanksi dagang yang diberlakukan oleh WTO. Peraturan WTO mempunyai kekuasaan tidak hanya judicial tetapi juga legislatif. Artinya, hukum dan kebijakan ekonomi nasional anggota WTO haruslah sesuai atau setidaknya dalam proses penyesuaian dengan perjanjian WTO.

Tabel 3.1 berikut ini merupakan struktur dasar dan isu-isu utama yang terangkum dalam persetujuan WTO.⁹⁸

⁹⁸Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, (2005). Hal 23.

Tabel 3.1
Struktur dan Isu Utama WTO

ISU	Barang	Jasa	Kepemilikan Intelektual	Sengketa
Prinsip Dasar	GATT	GATS	TRIPS	<i>Dispute Settlement Body</i>
Sektor	pertanian, <i>sanitary and phytosanitary</i> , tekstil dan pakaian jadi, standar produk, tindakan investasi, penilaian pabean, <i>pre-shipment inspection, rules of origin</i> , lisensi impor, subsidi dan tindakan imbalan, <i>safeguard</i>	pergerakan tenaga kerja, transportasi udara, keuangan, perkapalan, telekomunikasi		

Sumber: Data telah diolah kembali dari Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. (Jakarta, 2006). Hal 23.

Struktur di atas memberikan gambaran mengenai kedudukan TRIPS di antara berbagai perjanjian lainnya yang keseluruhannya menunjang kelancaran perdagangan internasional. Terkait dengan penelitian ini, maka persetujuan yang paling tepat untuk dianalisis adalah persetujuan TRIPS.

3.1.1 Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Internasional TRIPS

Sebelum lahirnya TRIPS dalam persetujuan WTO, dunia telah lebih dulu mengenal *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yang ditandatangani tanggal 14 Juli 1967 dan mulai berlaku sejak tahun 1970.⁹⁹ Kemudian WIPO menjadi badan khusus di bawah naungan PBB sejak 17 Desember 1974 dan menjadi titik acuan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Namun sayangnya, standar proteksi bagi kekayaan intelektual yang ada dalam WIPO dinilai tidak memadai karena tidak ada kewajiban bagi negara anggota PBB untuk

⁹⁹Christopher May. *The World Intellectual Property Organization, Resurgence and the Development Agenda*. (United Kingdom: Routledge Global Institutions, 2007). Hal 1.

mengadopsi peraturan yang terdapat dalam WIPO ke dalam legislasi tingkat nasional negara yang bersangkutan, tidak memiliki badan penasehat, mekanisme pelaksanaan dan penyelesaian sengketa, sehingga WIPO menuai banyak kritik terutama dari negara-negara yang industrinya maju.

Sekitar tahun 1980-an, negara-negara yang mengandalkan usaha industri mulai merevisi aturan perdagangan negaranya dengan menambahkan dan menjadikan isu HaKI sebagai isu yang penting dan mengkategorikan masalah pelanggaran HaKI sebagai salah satu jenis praktek perdagangan yang tidak jujur. Oleh karena itulah, sepanjang tahun 1980-an hingga awal 1990-an, AS dan beberapa negara Eropa menilai bahwa WIPO tidak mampu melindungi hak milik intelektual mereka di pasar internasional, dan berpendapat bahwa ketidakmampuan ini lama-kelamaan mengakibatkan defisitnya neraca perdagangan mereka, serta menyatakan ketidakpuasannya dengan perlindungan akan kekayaan intelektual di banyak negara berkembang.

Argumentasi AS dan beberapa negara Eropa mengenai kelemahan-kelemahan WIPO, antara lain:¹⁰⁰

1. WIPO hanya merupakan suatu organisasi di mana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga aturan-aturan yang ada tidak dapat diberlakukan terhadap negara non-anggota.
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran di bidang HaKI.
3. WIPO dianggap tidak mampu beradaptasi dengan transformasi perdagangan internasional dan perubahan tingkat ekonomi serta inovasi teknologi.

Atas dasar itulah, sejak tahun 1982 AS berusaha memasukkan permasalahan HaKI ini ke forum perdagangan GATT. Negara-negara maju membuat terobosan akan HaKI dengan menjadikannya sebagai salah satu prioritas dalam *new issue* yang diupayakan pada Putaran Uruguay, yang akhirnya membuahkan hasil berupa persetujuan TRIPS yang mengatur hak atas kekayaan

¹⁰⁰ H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003). Hal 206.

intelektual yang terkait dengan bidang perdagangan secara global.¹⁰¹ Awalnya gagasan ini ditentang oleh anggota negara-negara berkembang karena menganggap HaKI tidak terkait dengan perdagangan, sehingga pembahasan ini dianggap tidak tepat dalam forum perdagangan GATT. Tetapi setelah adanya argumentasi bahwa kemajuan perdagangan internasional suatu negara bergantung pada kemajuan/ keunggulan teknologinya termasuk perlindungan HaKI, sehingga terjadi hubungan erat antara keduanya, maka akhirnya para anggota negara berkembang bisa menerimanya.

Terbentuknya persetujuan TRIPS sebagai salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa, pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal di mana perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara. Persetujuan dalam TRIPS pun diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi yang lebih baik akan penghormatan atas inovasi seseorang dan dapat meningkatkan standar minimal pada proteksi beberapa kategori kekayaan intelektual.

Persetujuan TRIPS ini mencakup lima aspek yaitu:¹⁰²

1. Prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan GATT 1994 dan persetujuan internasional bidang HaKI.
2. Perlindungan yang cukup terhadap HaKI.
3. Penegakan hukum bidang HaKI.
4. Penyelesaian sengketa HaKI. Artinya sengketa dagang mengenai HaKI dapat diselesaikan melalui sistem penyelesaian sengketa WTO yang telah tersedia.
5. Pengaturan khusus yang diberlakukan selama periode transisi.

Kelima aspek dalam pembukaan TRIPS tersebut harus termuat dalam sistem HaKI baru di negara-negara anggotanya. Namun tentu aplikasinya punya implikasi yang bermacam-macam bagi para anggotanya. Tingkat pembangunan

¹⁰¹Gene M. Grossman, Edwin L. C. Lai. "International Protection of Intellectual Property." *The American Economic Review* Vol 94 No 5. (American Economic Association, 2004). Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3592837>, (waktu akses 9 Maret 2009, pukul 19.20 WIB).

¹⁰²Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, (2005). Hal 35.

yang tidak merata, sebagai realitas dalam tata hubungan negara-negara sangat berpengaruh dalam aplikasi sistem ini.¹⁰³ Untuk itu TRIPS memberi jalan keluar dengan menetapkan masa akselerasi yang berbeda bagi setiap kelompok negara. Kelompok negara maju diberikan waktu 1 tahun untuk menata kembali peraturan dan praktik hukum yang berlaku di negara-negara tersebut sesuai dengan persetujuan TRIPS. Kelompok negara berkembang diberikan waktu 5 tahun, sedangkan kelompok negara berkembang terbelakang diberikan waktu 11 tahun untuk menyesuaikan. Masa peralihan ini harus dimanfaatkan oleh para negara anggota untuk melakukan negosiasi-negosiasi untuk kemantapan pemberlakuan TRIPS itu sendiri seperti yang tertera pada aspek 5 tersebut di atas.

Aspek 1 dan 2 menunjukkan saling keterkaitan antara sesama perjanjian yang melekat pada WTO dan secara substantif pengaturan tentang HaKI harus menyumbang pada sistem perdagangan global yang lancar. Aspek 3 mengakui bahwa bagaimanapun pengaturan tersebut harus bisa efektif melalui hukum dan pengaturan yang bersifat nasional. Konflik antar negara pada aspek 4 harus diselesaikan secara efektif dan cepat. TRIPS sebagai bagian dari persetujuan WTO harus memanfaatkan keberadaan sistem penyelesaian sengketa seperti tertuang dalam peraturan *Dispute Settlement Body*.

Dalam penerapan perlindungan HaKI, perjanjian TRIPS menerapkan prinsip-prinsip dasarnya yang sama dengan prinsip-prinsip WTO, yaitu prinsip *National Treatment*, yakni dengan memberi perlakuan yang sama kepada pihak nasional dan asing. Prinsip MFN, dengan memberi perlakuan yang sama kepada semua mitra dagang anggota WTO antara pemilik HaKI asing dari satu negara dengan pemilik HaKI asing dari negara lain. Dan prinsip transparansi, yakni terbuka dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang perlindungan HaKI. Peraturan tersebut berlaku bagi setiap negara anggota WTO.¹⁰⁴ Jadi jika ada negara anggota yang tidak mematuhi perjanjian, ia bisa diadukan oleh negara anggota lainnya karena merugikan mitra dagangnya, serta mendapatkan sanksi perdagangan yang diberlakukan oleh WTO.

¹⁰³ A. Zen Umar Purba. "TRIPs dan Negara-Negara Berkembang." *Jurnal Hukum Internasional* Vol 1 No 2 Januari 2004. (Depok: Lembaga pengkajian Hukum Internasional FHUI, 2004). Hal 248.

¹⁰⁴ H.S. Kartadjoemena, *op. cit.*, hal 267.

Menurut TRIPS Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil karya buah pikirannya. Pemilik hak ini akan diberikan hak eksklusif atas hasil kreasinya untuk periode waktu tertentu.¹⁰⁵

Hak atas kekayaan intelektual tersebut merupakan hak kebendaan atas suatu karya yang bersumber dari hasil kerja otak dan rasio. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Hanya orang yang mampu mendayagunakan intelektualitasnya sajarah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut hak atas kekayaan intelektual. Oleh sebab itu hak ini bersifat eksklusif karena tidak semua orang dapat melahirkan karya intelektualitas. Hak atas kekayaan intelektual seyogyanya menciptakan hubungan antara usaha manusia dan penghargaan atasnya.

Ide dan inovasi merupakan bagian yang penting karena dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dikomersialisasikan. Berbagai produk kekayaan intelektual dapat mempunyai nilai yang tinggi, jauh melebihi bahan-bahan pembuatnya karena mengandung nilai dan kreativitas di dalamnya serta tidak terlepas dari serangkaian penemuan, pembaharuan, riset, desain, dan pengujian. Untuk itu, para pembuat produk-produk bernilai tersebut memiliki hak untuk mencegah orang lain menggunakan penemuan mereka atau membuat salinan tanpa seijinnya. Contoh sederhana misalnya, ketika seorang pencipta diberikan perlindungan hak cipta atas puisinya, maka ia memiliki hak untuk melarang orang lain membuat salinan puisi tersebut tanpa seijinnya.

Persetujuan TRIPS pun menekankan bahwa perlindungan bagi kekayaan intelektual harus mendorong inovasi dan alih teknologi, serta menggarisbawahi pentingnya bagi produsen maupun konsumen untuk memperoleh keuntungan dan peningkatan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan.

Sedangkan yang menjadi titik acuan perlindungan kekayaan intelektual adalah aturan-aturan pokok pada persetujuan di WIPO yang telah ada sebelum TRIPS, yaitu:¹⁰⁶

¹⁰⁵ TRIPS: *What Are IPRS?* Diakses dari http://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPS_e/intell_e.htm, (waktu akses 5 Februari 2009, pukul 14.45 WIB).

¹⁰⁶ A. Zen Umar. Purba, *op.cit.*, (2005). Hal 239.

- *The Paris Convention of Industrial Property*, untuk perlindungan kekayaan industri (1967).
- *The Berne Convention for The Protection Literary and Artistic Works*, untuk perlindungan sastra dan karya artistik (1971).
- Perjanjian *Washington* untuk *layout design* dari sirkuit terpadu (1989).
- *Rome Convention for Protection of Performers, Producer of Phonograms and Broadcasting Organization* (1961).

Standar proteksi bagi kekayaan intelektual yang ada dalam konvensi-konvensi tersebut dianggap kurang memadai oleh negara-negara yang mengandalkan industrinya karena dianggap tidak mampu melindungi hak milik intelektualnya di pasar internasional, sehingga persetujuan TRIPS diharapkan dapat meningkatkan standar proteksi kekayaan intelektual.

Standar proteksi yang diberikan TRIPS atas HaKI dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:¹⁰⁷

1. Hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait lainnya (biasa disebut *related rights* atau *neighbouring rights*).
2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property*)

Hak milik perindustrian dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis:

- Merek Dagang (Trademark)
- Indikasi Geografis
- Desain industri
- Paten
- Desain tata letak sirkuit terpadu
- Rahasia dagang

Karena hak cipta, paten, merek dagang, dan lain-lain berbeda tipe inovasinya maka berbeda pula perlakuan standar proteksinya.¹⁰⁸ Paten, desain industri, desain sirkuit tata letak terpadu, indikasi geografis, dan merek dagang harus terdaftar untuk memperoleh perlindungan, dan yang dimuat dalam pendaftaran adalah penemuannya, desain, nama dagang, logo, dan lain-lain untuk informasi kepada publik. Sedangkan hak cipta dan rahasia dagang secara otomatis

¹⁰⁷*TRIPS: What Are IPRS? op. cit.*

¹⁰⁸Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, (2006). Hal 36.

akan dilindungi sesuai dengan kondisi spesifik. Kedua hak ini tidak harus didaftarkan, dan oleh karena itu datanya tidak perlu dibuka untuk umum, contohnya hak cipta mengenai bagaimana konstruksi suatu program komputer. Perbedaan lainnya adalah jangka waktu perlindungan tiap-tiap kekayaan intelektual. Berkaitan dengan penelitian ini, maka hak yang akan dibahas secara rinci selanjutnya adalah hak cipta.

Secara historis, perkembangan kekayaan intelektual sebenarnya dapat dibagi ke dalam tiga masa.¹⁰⁹ Masa pertama digambarkan dengan kondisi dunia tanpa adanya perlindungan internasional akan HaKI. Masa kedua adalah saat tercetusnya Konvensi Paris dan Berne yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Sedangkan masa yang ketiga adalah ketika hak kekayaan intelektual memiliki hubungan dengan perdagangan, serta munculnya TRIPS yang sampai saat ini merupakan kesepakatan yang paling relevan. Isi perjanjian internasional TRIPS antara lain mencakup pengaturan atas ketentuan umum dan prinsip dasar; standar, ruang lingkup, dan penggunaan HaKI; pelaksanaan HaKI; pemeliharaan atas HaKI; pencegahan dan penyelesaian sengketa; pengaturan peralihan; serta pengaturan institusional.¹¹⁰ Hal ini menyebabkan TRIPS dijadikan acuan utama pada setiap permasalahan dagang yang terkait dengan HaKI.

Pembahasan lebih lanjut tentang ruang lingkup hak cipta bidang perdagangan yang terangkum dalam perjanjian internasional TRIPS akan dibahas pada subbab berikut. Pembahasan khusus hak cipta ini sangatlah penting untuk melihat dimensi dan hal-hal yang melingkupi hak cipta.

3.1.2 Ruang Lingkup Hak Cipta Dalam Perjanjian Internasional TRIPS

Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi tidaklah lahir begitu saja. Kelahirannya membutuhkan banyak 'energi' dan biaya yang besar. Misalnya saja industri di bidang musik dan rekaman. Untuk menghasilkan suara yang

¹⁰⁹ "Perdagangan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Global Justice Update*, Vol IV, No 61-61, 1-31 April 2006. (Jakarta: Institute for Global Justice, 2006). Hal 19.

¹¹⁰ *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Diakses dari http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, (waktu akses 7 Januari 2009, pukul 14.19 WIB).

berkualitas baik, para produser harus mempersiapkan studio rekaman yang berkualitas baik pula, ditambah lagi dengan persiapan awal sebelum masuk ke studio rekaman yang mengharuskan para komponis, penyanyi, semua orang yang terlibat di dalamnya, 'menguras' talenta seni yang ada dalam dirinya. Kesemua proses itu menunjukkan betapa rumit dan beratnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-pihak yang terkait untuk kelahiran sebuah karya cipta. Dengan begitu, pantaslah hak yang lahir karenanya dirumuskan sebagai hak milik yang bersifat eksklusif dan patut dihormati dalam wujud perlindungan hukum. Tujuan utama dari perlindungan akan hak cipta dan hak terkait lainnya adalah untuk menumbuhkan dan memberikan penghormatan karya-karya kreatif.¹¹¹

Produk-produk ataupun hasil karya yang mengandung hak cipta merupakan salah satu ruang lingkup HaKI yang akan dibahas secara mendalam pada penelitian ini. Hak cipta itu sendiri lahir sejalan dengan lahirnya mesin cetak. Sebelum mesin cetak ditemukan, proses untuk membuat sebuah salinan akan karya tulisan memakan tenaga, biaya dan waktu yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Oleh sebab itu, pada awalnya para penerbitlah yang memperoleh perlindungan hukum. Baru ketika pertama kali undang-undang hak cipta dibuat di Inggris tahun 1710, hak tersebut kemudian terutama diberikan kepada pengarang.¹¹²

Konvensi hak cipta sebenarnya telah dimulai sejak Konvensi *Berne* tahun 1886, yaitu *International Convention for The Protection of Literary and Artistic Work*, yang ditandatangani di Berne, Swiss pada tanggal 9 September 1886. Kemudian konvensi ini telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu di Paris 4 Mei 1896, Berlin 13 November 1908, Berne 20 Maret 1914, Roma 2 Juni 1928,

¹¹¹Di samping hak cipta, terdapat hak yang dilindungi oleh hak terkait lainnya (*related rights*) yang merupakan hak yang lahir dari adanya hak cipta induk. Hak ini biasanya terdapat pada pertunjukkan, organisasi penyiaran, produser *phonograms* (rekaman suara). Antara hak cipta dengan hak terkait lainnya merupakan satu kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Adanya *related rights* selalui diikuti dengan adanya hak cipta, tetapi sebaliknya adanya hak cipta tidak mengharuskan adanya *related rights*. Contohnya adalah, liputan pertunjukkan *live show* penyanyi adalah hak cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah *related rights*. Diambil dari H. OK. Saidin, *op. cit.*, hal 133-135.

¹¹² *History of Copyright: What Are Copyrights?* Diakses dari <http://www.historyofcopyright.org/>, (waktu akses 13 Maret 2009, pukul 12.09 WIB).

Brussel 26 Juni 1948, Stockholm 14 Juli 1967, dan terakhir di Paris 29 Juli 1971, serta diubah lagi 28 September 1979.¹¹³

Isi Perjanjian TRIPS yang berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait lainnya diatur pada Bagian II, Bab 1, Pasal 9-14, yang merujuk pada *Berne Convention* dan *Rome Convention*. *Rome Convention* adalah suatu konvensi internasional lain yang dirujuk oleh TRIPS dalam hubungannya dengan hak pelaku (*performers*), produser *phonogram*, dan lembaga penyiaran, yang disepakati tahun 1961.

Pasal 9 TRIPS memuat tentang:¹¹⁴

(1) *Member shall comply with 1-21 and the appendix of Berne Convention (1971). However, member shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of the rights derived therefrom.*

(2) *Copyrights protection shall extend to expression and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concept as such.*

(1) *Para anggota harus mematuhi pasal 1 hingga pasal 21 berikut lampirannya Konvensi Berne (1971). Meski demikian, para anggota tidak memiliki hak atau kewajiban menurut perjanjian ini sehubungan dengan hak-hak yang diberikan di bawah pasal 6bis dari konvensi tersebut atau hak-hak yang berasal daripadanya.*

(2) *Perlindungan hak cipta diperluas atas ekspresi dan bukan atas gagasan, prosedur, metode operasi atau konsep matematika lainnya.*

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta dan hak terkait lainnya (dengan lambang internasional ©)¹¹⁵ merupakan hak eksklusif pencipta atas hasil ekspresi untuk mengatur penggunaan hasil karyanya tersebut. Hak cipta biasanya semula terkandung dalam alam pikiran/ ide, dan untuk dapat dilindungi, harus ada wujud nyata dari alam pikiran tersebut. Misalnya saja, supaya dapat disebut sebagai karya seni, karya tersebut harus tertuang dalam bentuk lukisan atau irama lagu. Jadi jika ide tersebut belum tertuang dalam suatu bentuk, maka ia belum bisa dikatakan memiliki hak cipta.

¹¹³ A. Zen Umar Purba, *op. cit.*, (2005). Hal 44.

¹¹⁴ *Ibid.* Hal 242.

¹¹⁵ Lambang © merupakan lambang internasional untuk hak cipta yang berasal dari *Universal Copyright Convention* (UCC) Pasal 3.1 tahun 1971. UCC merupakan konvensi yang dibangun oleh UNESCO, di bawah PBB. UCC yang lahir tahun 1952, kemudian di revisi tahun 1971 ini merupakan konvensi internasional lain di samping *Berne Convention* yang juga melindungi hak cipta.

Di dalam hak cipta terkandung hak moral dan hak ekonomi,¹¹⁶ di mana hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun, walau hak tersebut telah dialihkan sekalipun.

Menurut pasal 2 ayat (1) Berne Convention, karya-karya cipta yang dilindungi adalah sebagai berikut:¹¹⁷

(1) The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets, and other writings; lectures, addresses, sermon and other works of the same nature; dramatic and dramatico-musical works; choreographic works and entertainment in dumb show, musical composition with or without words, cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography, photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to photography, topography, architecture or science.

(1) Istilah "karya-karya cipta seni dan sastra" meliputi setiap kegiatan produksi dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan bidang seni atau apapun yang dapat berupa bentuk atau model dari ekspresi tersebut seperti buku-buku, pamphlet-pamphlet, dan jenis tulisan yang lain, bahan-bahan kuliah; ceramah-ceramah; khotbah-khotbah; dan karya-karya cipta lain yang sama sumbernya; drama atau karya-karya cipta drama; musikal; karya-karya koreografi; dan pertunjukkan hiburan; komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata; karya-karya cipta sinematografi yang merupakan karya cipta yang diasimilasikan yang diungkap dengan suatu proses yang sama dengan sinematografi, karya-karya cipta gambar; lukisan; arsitektur; patung, seni pahat; dan litografi; karya-karya fotografi yang merupakan karya ciptaan gabungan yang diungkapkan dengan suatu proses yang persis sama dengan fotografi; karya cipta seni terapan; ilustrasi-ilustrasi; peta-peta; rencana-rencana; sketsa-sketsa dan karya-karya cipta tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur atau ilmu pengetahuan.

Di samping karya-karya asli (dari pencipta asli/ pertama), *Berne Convention* juga mengatur dan melindungi karya-karya yang termasuk karya

¹¹⁶ H. OK. Saidin, *op. cit.*, hal 60.

¹¹⁷ A. Zen Umar Purba, *op. cit.*, (2005). Hal 298.

terjemahan, saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra dan seni, karena karya-karya tersebut menciptakan nilai tambah ekonomi.

Melihat kenyataan perkembangan teknologi digital yang pesat, maka TRIPS pun mengatur perlindungan atas program komputer dan kompilasi data yang termuat dalam Pasal 10 Persetujuan TRIPS. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa program komputer dilindungi sebagai *literary works* seperti dimaksud dalam *Berne Convention*, dan begitu juga dengan kompilasi data (*database*) yang isinya mengandung materi *intellectual creation*, baik itu dibuat dalam format yang terbaca melalui mesin atau melalui format lain, akan mendapat perlindungan sebagai karya cipta.

Pengaturan tentang penyewaan program komputer serta karya sinematografis diakomodasi dalam TRIPS dengan ketentuan mengenai hak penyewaan, yaitu bahwa negara anggota dapat memberikan kepada pencipta hak untuk melarang penyewaan komersial bagi publik atas karya asli atau kopi dari suatu karya yang dilindungi. Ketentuan ini jelas diarahkan terhadap negara-negara berkembang yang dianggap sebagai tempat yang subur bagi pembajakan hak cipta.¹¹⁸

Pasal 9 sampai dengan pasal 14 tentang hak cipta dan hak terkait lainnya yang terdapat pada aturan TRIPS dapat disimpulkan isinya bahwa hak dari pemilik karya-karya artistik dan literatur (termasuk buku dan hasil tulisan lain), komposisi musik, lukisan, patung, penciptaan perangkat lunak (*software*) komputer, dan sinematografi film dilindungi oleh hak cipta, dan diberikan seumur hidup hingga 50 tahun setelah kematiannya.

Adapun industri-industri penghasil produk berhak cipta menurut IIPA dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu:¹¹⁹

- *Core copyrights industries*, merupakan industri yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan atau menyalurkan materi-materi hak cipta. Yang termasuk dalam kategori industri ini adalah penerbitan buku, produk rekaman musik (kaset, CD), koran,

¹¹⁸ A. Zen Umar Purba, *op. cit.*, (2005). Hal 65.

¹¹⁹ Pengkategorian yang dilakukan IIPA ini mengikuti standar internasional industri hak cipta oleh WIPO. Diambil dari Stephen E. Siwek, *op. cit.*, (2004).

tabloid periodik, film (DVD film), radio, penyiaran televisi dan peranti lunak komputer (termasuk perangkat lunak bisnis ataupun hiburan).

- *Total copyright industries*, merupakan industri yang mencakup dan mewakili seluruh industri penghasil hak cipta termasuk *core copyright industries*, *partial copyrights industries*, merupakan industri yang memiliki produk yang telah mempunyai materi hak cipta sebelumnya. Misalnya kain, furnitur hingga arsitektur. *Non-dedicated support industries*, merupakan industri yang terlibat dalam pendistribusian produk produk hak cipta seperti jasa transportasi, perdagangan grosir dan retail, dan industri telekomunikasi. Serta *interdependent industries*, merupakan industri yang memproduksi, membuat, dan menjual peralatan yang fungsi utamanya ialah untuk memfasilitasi kreasi, produksi dan penggunaan hasil hak cipta tersebut.

Semua hak kekayaan intelektual yang dilindungi TRIPS, termasuk hak cipta dan hak terkait lainnya, memiliki pakem-pakem yang menjadi landasan pelaksanaan dan perlindungan HaKI di tiap negara anggotanya. Pakem-pakem tersebut diatur dalam beberapa pasal dalam TRIPS. Pasal 41.1 Perjanjian TRIPS misalnya, mengharuskan tiap anggotanya untuk memiliki prosedur pelaksanaan yang efektif dalam melawan tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Efektif berarti adanya efek yang nyata dan tegas.¹²⁰ Penerapan pasal ini juga menjadi cara untuk menghindari/ mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Pasal lainnya yang mengatur pelaksanaan dan perlindungan kekayaan intelektual adalah Pasal 46 Perjanjian TRIPS menyatakan bahwa dalam upaya menciptakan pencegahan pelanggaran yang efektif, pengadilan terkait yang berwenang, harus memiliki kekuasaan untuk memutuskan bahwa barang yang ditemukan merupakan pelanggaran dan tanpa kompensasi apapun, akan cenderung dikeluarkan dari jalur perdagangan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi pemegang hak asli, atau bahkan dihancurkan. Berkaitan dengan Pasal 46

¹²⁰“Definition of Effective.” *Merriam-Webster Dictionary*. Diakses dari <http://www.m-w.com/dictionary/effective>, (waktu akses 26 Maret 2009, pukul 12.43 WIB).

Perjanjian TRIPS, maka Pasal 49 Perjanjian TRIPS dibuat untuk menghindari adanya upaya pengeksportan produk-produk palsu yang melanggar. Kemudian TRIPS juga mengatur tentang wewenang pengadilan dalam mengambil tindakan yang cepat-tepat dan efektif terhadap pelaku pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 50.

Sedangkan pengaturan mengenai prosedur kriminal atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terangkum dalam Pasal 61 Perjanjian TRIPS yang mengatur prosedur kriminal yang akan dikenakan kepada para pelanggar produk-produk HaKI, termasuk hak cipta dan hak terkait lainnya. Yaitu bahwa, tiap negara anggota TRIPS harus menyediakan prosedur kriminal dan penalti/ pidana denda bagi para pelanggar/ pembajak hak cipta dalam skala komersial. Hukuman yang dapat diberikan termasuk hukuman kurungan penjara dan/ hukuman denda, yang konsisten dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Untuk produk berhak cipta itu sendiri, pelanggaran yang kerap kali terjadi adalah pembajakan. Menurut Oded Shenkar (2006), *piracy* atau pembajakan mengarah pada tindakan tidak sah pada produksi, distribusi, ataupun pemakaian suatu barang, desain, ataupun teknologi melalui cara-cara yang tidak sah.¹²¹ Misalnya saja meniru/ meng-*copy* perangkat lunak (*software*) tanpa izin pemilik asli ataupun memberikan kompensasi. Tujuan utama dari pembajakan adalah membuat produk yang serupa yang dapat dijual kepada konsumen tetapi dengan harga yang murah.

3.1.3 Implementasi Aturan Hak Cipta di China

Dapat dikatakan bahwa China tidak berusaha keras untuk memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual hingga awal abad 20-an. Meskipun telah ada peraturan-peraturan yang menyangkut HaKI sebelumnya, masalah pembajakan terhadap kekayaan intelektual disinyalir diperburuk oleh industrialisasi yang terus tumbuh di China.

Hukum hak cipta China telah ada sejak 7 September 1990 yang diadopsi dari sesi kelimabelas Komite Tetap dari Kongres Rakyat Nasional ketujuh. Kemudian direvisi sesuai dengan Keputusan tentang Perubahan dari Undang-

¹²¹ Oded Shenkar, *op. cit.*, hal 83.

Undang Hak Cipta yang diadopsi dari sesi kedupuluh empat Komite Tetap dari Kongres Rakyat Nasional kesembilan pada tanggal 27 Oktober 2001.¹²² Perubahan akan Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan China tahun 2001 merupakan salah satu upaya China dalam mempersiapkan diri untuk masuk dalam keanggotaan WTO, dan untuk melindungi lebih baik lagi para pemilik hak cipta baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Perubahan juga dilakukan untuk menyesuaikan antara undang-undang hak cipta China dengan konvensi internasional tentang perlindungan hak cipta, dan WTO dalam hal ini TRIPS.¹²³ Perubahan undang-undang yang dilakukan adalah dengan memperluas lingkup hukum yang melibatkan lebih banyak bidang, termasuk pertunjukkan akrobatik, desain arsitektur, karya seni dan sastra yang dipublikasikan melalui internet.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi *Berne* (China tercatat sebagai negara yang ikut serta pada keanggotaan Konvensi *Berne* untuk perlindungan literatur dan karya artistik pada tahun 1992) dan TRIPS yang mengatur tentang hak cipta, maka ketentuan tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta China, bahwa undang-undang ini berlaku terhadap hasil karya warga negara China, badan hukum atau organisasi lainnya, baik yang dipublikasikan atau tidak, harus menikmati hak cipta sesuai dengan undang-undang ini.¹²⁴ Serta, setiap hasil karya warga negara asing atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan sekalipun, yang memenuhi syarat untuk menikmati hak cipta sesuai dengan kesepakatan yang ada antara warga negara asing yang berasal dari atau negara atau di mana pun kediamannya di China, atau di bawah perjanjian internasional di mana kedua negara menjadi anggota, maka harus dilindungi sesuai dengan undang-undang ini.

¹²²*Copyrights Law of the People's Republic of China*. Diakses dari http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/laws/relatedlaws/200204/t20020416_34754.htm, (waktu akses 6 Febuari 2009, pukul 14.45 WIB).

¹²³*China Amends Copyright Law*. Diakses dari <http://www.china.org.cn/english/2001/Nov/22246.htm>, (waktu akses 10 Maret 2009, pukul 19.08 WIB).

¹²⁴*Copyright Law of the People's Republic of China, op. cit.*, art 2.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Hak Cipta China, maka istilah “karya“ yang termasuk karya sastra, seni, ilmu alam, ilmu sosial, teknik dan teknologi yang dilindungi dinyatakan dalam bentuk berikut:¹²⁵

- (1) Karya tertulis;
- (2) karya lisan;
- (3) musik, drama, koreografi, dan karya akrobatik;
- (4) karya-karya seni rupa dan arsitektur;
- (5) karya fotografi;
- (6) karya sinematografi dan karya-karya yang dibuat berdasarkan metode produksi film;
- (7) gambar desain mesin dan produk, peta, sketsa, dan karya grafis serta model;
- (8) perangkat lunak komputer;
- (9) karya lainnya yang termasuk dalam undang-undang dan peraturan administratif.

Sejalan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam TRIPS, maka China pun memberikan perlindungan seumur hidup sampai 50 tahun setelah kematiannya dan berakhir pada tanggal 31 Desember, bagi para pemilik hak cipta.

Terkait masalah penindakan terhadap pelanggaran hak cipta, maka masuknya China ke WTO inipun berarti China harus memenuhi pasal 41, 50, 61 TRIPS, yaitu bahwa pemerintah melalui aparat terkaitnya harus:¹²⁶

- Bekerjasama lebih erat dengan industri yang terkait.
- Membuat sistem yang lebih transparan.
- Memerangi pembajakan sebagai prioritas.
- Meningkatkan hukuman administrasi.
- Meningkatkan hukuman pidana, dengan menurunkan ambang batas pidana, menjatuhkan denda dan hukuman penjara bagi pelanggar.

Selain itu, langkah masuknya China ke WTO ini harus diikuti dengan rencana untuk memperbaiki aturan pasaran audio dan audiovisual, bekerjasama

¹²⁵ *Copyright Law of the People's Republic of China, op. cit.*, art 3.

¹²⁶ *IIPA 2002 Special 301 Report on People's Republic of China*. Diakses dari <http://www.iipa.com/rbc/2002/2002SPEC301PRC.pdf>, (waktu akses 26 Maret 2009, pukul 21.15 WIB).

dengan perusahaan-perusahaan terkait, dan mengatasi perkembangan pembajakan jurnal yang terjadi di dalam pemerintahan China, institusi penelitian, universitas, dan perpustakaan.

3.2 Pelanggaran Hak Cipta Produk-produk AS Oleh China

Sejak China membuka dirinya untuk kehadiran investasi asing, maka pemerintah China mulai berupaya untuk menerapkan dan mengimplementasikan hukum yang dapat melindungi hak kekayaan intelektual. Mulai pertengahan tahun 1980an China telah menerapkan beberapa hukum dan aturan administrasi yang melindungi HaKI di negaranya, kemudian ini dilanjutkan dengan dibentuknya Pengadilan Kekayaan Intelektual pada tahun 1993.¹²⁷ Namun, keefektifan dari perlindungan yang diberikan pemerintah China masih jauh dari memuaskan. Kemampuan pemerintah pusat untuk mengatasi praktik pelanggaran HaKI masih belum maksimal karena pemerintah kesulitan untuk mengawasi praktik tersebut yang dilakukan di berbagai daerah. Belum lagi, banyaknya pelanggar yang justru mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.

Pelanggaran yang banyak dilakukan China terhadap produk AS adalah pelanggaran hak cipta, ini dikarenakan proses yang perlu dilakukan dalam pembajakan produk hak cipta relatif mudah, biaya untuk melakukan aksi pembajakan film ini pun relatif murah, dan tidak memakan waktu lama. Misalnya saja untuk pembajakan produk rekaman dan musik, dengan berkembangnya format CD-R yang mempermudah proses penggandaan, maka CD bajakan semakin menjamur karena hampir setiap orang dapat melakukannya. Sangat wajar jika AS bersikap demikian tegas China karena pembajakan yang dilakukan China mempengaruhi penjualan dan ekspor industri hak cipta AS, padahal seharusnya dengan penguasaan inovasi, teknologi, dan produk yang dimiliki AS, AS mestinya menikmati jerih payahnya sendiri dengan surplus perdagangan dalam produk hak ciptanya.

¹²⁷Mark Lam, John Graham. *China Now*. (United States of America: The McGraw-Hill Companies, 2007). Hal 92.

Apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HaKI, khususnya pembajakan hak cipta di China yang sampai saat ini masih terjadi, antara lain disebabkan karena:¹²⁸

1. Konfusionisme dan nilai-nilai tradisional China¹²⁹

Nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Konfusionisme telah berakar pada filosofi politik, sosial, dan budaya China sampai pada era awal abad 20-an. Ajaran tersebut tidak menganggap tindakan penjiplakan sebagai tindakan yang melanggar norma. Sebaliknya, hasil kreativitas dianggap sebagai keuntungan kolektif bagi masyarakat dan generasi berikutnya, sehingga hak kepemilikan terhadap satu benda justru dianggap melanggar hukum.

2. Sistem ekonomi sosialis yang terencana

Pemerintahan Komunis China sejak tahun 1949 hingga awal 1980an menerapkan sistem Ekonomi Sosialis yang menetapkan bahwa segala bentuk kekayaan adalah milik negara dan rakyat, ketimbang milik pribadi. Dengan demikian, segala bentuk kekayaan baik itu dalam bentuk nyata ataupun intelektual, adalah haram hukumnya untuk menjadi milik pribadi. Akibatnya, selama Revolusi Kultur (*Cultural Revolution*)¹³⁰, pemerintah seringkali dengan keras mengkritik para ilmuwan, pengacara, penulis, seniman dan para intelektual serta menghukum mereka untuk menjadi pekerja kasar atau mengirim mereka ke penjara. Pandangan kaum Sosialis berkaitan dengan hasil karya memiliki similaritas dengan

¹²⁸ Mark Lam, John Graham, *op. cit.*, hal 325-330.

¹²⁹ Ajaran Konfusionisme lahir dari seorang filsuf China yang bernama Kong Qui (Konfusius) sekitar 2500 tahun yang lalu. Ia mengajarkan moral yang didasarkan pada kebajikan dan perbuatan baik. Salah satunya yang terkenal adalah “*Jangan membebankan kepada orang lain apa yang dirimu sendiri pun tak menginginkannya*”. Ia mempertahankan ajaran tersebut ke dalam kehidupan masyarakat karena menganggap bahwa ajaran itu akan membuat kemakmuran masyarakat dan keadaan politik lebih stabil. Diambil dari Mark Lam, John Graham, *op. cit.*, hal 15-16.

¹³⁰ Revolusi Kultur berlangsung dari 1966-1976. Masa tersebut merupakan masa terpuruknya China sejak 50 tahun sebelumnya. Saat itu, pemimpin China Mao Zhedong mulai kehilangan kekuatannya sebagai pemimpin partai. Untuk mengembalikan kekuatan dan kekuasaannya, ia membentuk Penjaga Merah (*The Red Guards*), yang terdiri dari para militan, mahasiswa dan murid-murid SMU, untuk menjadi unit militer di seluruh China. Penjaga Merah ini diperintah untuk menghancurkan semua yang bersifat tradisional, menjatuhkan sistem pendidikan, serta mengasingkan para pembuka jalan kapitalis, seperti Deng Xiaoping ke pedesaan. Kejadian ini hampir menimbulkan perang sipil di China, hingga akhirnya Mao membubarkan Penjaga Merah pada tahun 1968. Namun, dampak dari peristiwa ini terus berlangsung hingga kematian Mao pada tahun 1976. Diambil dari Mark Lam, John Graham, *op. cit.*, hal 26-27.

pandangan Konfusian yang secara konservatif selama berabad-abad beranggapan bahwa kekayaan intelektual adalah milik bersama dan untuk dimanfaatkan bersama, bukan untuk dimiliki secara pribadi untuk memperkaya sang pencipta itu sendiri.

3. Abad Pertengahan Kerajaan, *Xenophobia*,¹³¹ dan Nasionalisme

Pada tahun 1973 penguasa Qianlong mengirimkan surat kepada George III, Raja Inggris yang menyatakan bahwa China memiliki segalanya, dan tidak berminat pada barang-barang yang diproduksi oleh Inggris. Rasa etnosentrisme¹³² China ini justru menyebabkan China mengalami penghinaan selama kurang lebih dua abad karena perkembangan ilmiah maupun militer pihak Inggris lebih berkembang, dan itu membuktikan kalau Qianlong salah. Sementara itu sebagian besar kaum terpelajar China memandang rendah kaum dagang dan urusan luar negeri barat, *xenophobia* dan sentimen nasionalisme di antara rakyat sebagai hasil dari penghinaan berakibat pada sulitnya melakukan reformasi.

Menjelang abad ke-20 industri dan investasi asing telah mendominasi perdagangan modern di China dan mengganggu kebijakan ekonomi swasembada agraris, industri kerajinan lokal serta merusak hubungan keluarga yang tradisional.

Instabilitas sosial, perang dan semakin maraknya imperialisme pihak asing terus menggerogoti China sepanjang abad ke-19 dan 20 sebagai beban sejarah dan penghinaan bagi mereka. Hal inilah yang justru mendorong China mengadopsi pandangan untuk memperkuat diri sendiri, dan secara efektif dipergunakan oleh Mao. Kebanyakan rakyat China percaya bahwa tidaklah salah untuk mereproduksi dengan bebas atau untuk mentoleransi reproduksi karya asing secara ilegal yang akan

¹³¹Xenophobia merupakan rasa takut dan kebencian terhadap orang ataupun barang asing atau apapun yang bersifat asing. "Xenophobia." *Merriam Webster Dictionary*. Diakses dari <http://www.merriam-webster.com/dictionary/xenophobia>, (waktu akses 14 Maret 2009, pukul 21.31 WIB).

¹³²Etnosentrisme adalah karakter yang didasarkan perasaan/ anggapan kalau kelompoknya lebih superior dibanding yang lain. "Ethnocentrism." *Merriam Webster Dictionary*. Diakses dari <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ethnocentrism>, (waktu akses 14 Maret 2009, pukul 21.46 WIB).

membantu untuk memperkuat negaranya. Konsep menjiplak dipercaya banyak pihak sebagai suatu langkah yang harus ditempuh demi menyusul negara-negara barat. Hingga saat ini kebanyakan orang China menganggap program komputer bajakan sebagai “perangkat lunak patriot” yang akan mengakselerasi proses modernisasi negaranya dengan biaya serendah mungkin atau tanpa biaya sama sekali, sebagai balasan atas penjarahan negaranya selama dua abad oleh kaum barat.

4. Hukum dengan karakteristik China

China memiliki tradisi hukum yang berbeda dengan kaum barat. Tidak hanya mereka memandang hukum sebagai media sekunder untuk memelihara kondisi sosial mereka, tapi mereka juga menganggap hukum sebagai media yang tidak terlalu disukai. Konsep Konfusian “*li*” (ritual/keupacaraan) adalah cara untuk memerintah, bukan “*fa*” (hukum). Melalui “*li*” mereka dapat mengerti peran, tanggung jawab dan kewajiban mereka terhadap sesama dan masyarakat. Implikasinya adalah penghindaran konfrontasi dan konflik guna memelihara keharmonisan, sehingga hukum dan kebijakan yang eksplisit tidak terlalu diharuskan dan proses pengadilan wajib senantiasa dihindari. Walau demikian, nuansa hukum tentunya tidak lepas dari lingkungan birokrasi dan tampuk kepemimpinan pembuat kebijakan. Tentu saja hukum tetap dipandang sebagai formulasi konkrit terhadap kebijakan yang dibuat oleh partai walupun bersifat sangat fleksibel. Namun demikian, hukum China secara detil disusun oleh pihak administrasi di bawah dewan negara, dan seringkali hanya implementasi administrasi dari peraturan tersebutlah yang dapat menjelaskan secara konkrit mengenai definisi, batasan dan implikasi praktis atas hak-hak yang sah menurut hukum itu sendiri. Untuk menentukan efektifitas dan aplikatifitas dari ketentuan tersebut, harus dilakukan pemeriksaan seluruh hukum dan dokumen tambahan termasuk peraturan administratif serta interpretasi yudisial dalam wilayah yang berhubungan dan berkaitan.

Dengan demikian, hukum China adalah unik dan memiliki karakter berbeda yang sebagian dipengaruhi oleh gagasan pemerintahan Konfusian dan sebagian dari ide komunis Mao. Berlawanan dengan sistem Amerika

Serikat yang memisahkan eksekutif, legislatif dan wewenang yudisial, hukum China lebih dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari partai. Disandingkan dengan ketidakmatangan sistem pengadilan, maka tidak mengherankan bahwa hukum dengan karakteristik China yang telah berlangsung sekian lama, terus akan berlanjut di masa depan. Hal ini masih akan ditambah dengan faktor-faktor lainnya yang dalam hal ini akan menunjukkan apakah China akan mampu mengadopsi dan menjalankan hukum kekayaan intelektualnya secara efektif, seperti yang telah dimandatkan oleh TRIPS, sejalan dengan upaya pemerintah China untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini hak cipta dalam negerinya.

Empat hambatan budaya, politik, nasionalisme, dan hukum tersebut disinyalir dapat menghalangi China dalam mengadaptasi secara penuh aturan HaKI internasional khususnya TRIPS. Faktor-faktor tersebut masih ditambah lagi dengan kondisi China yang sadar bahwa negaranya tertinggal jauh di bidang inovasi teknologi dengan negara-negara besar seperti AS, sehingga hal itu malah membuat perlindungan dan penghormatan akan HaKI semakin lemah. Sistem hukum yang lemah, ketidaktegasan dalam pelaksanaannya, lemahnya kontrol pemerintah, kebalnya pejabat publik, tidak adanya transparansi dalam operasional pemerintah, membuat pelanggaran hak cipta semakin merajalela. Sebagai akibatnya, maka tidak ada kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HaKI, sehingga segala bentuk pelanggaran secara moral dianggap wajar. Bagi masyarakat China, China memiliki kepentingan untuk memperoleh akses yang tidak terbatas atas teknologi asing selama proses pembangunannya, dan tindakan pembajakan dianggap dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan karya-karya dengan harga yang masuk akal.¹³³

Misalnya saja, dapat dilihat dari banyaknya perusahaan pembuat produk palsu (biasanya bekas BUMN) yang justru mendapat dukungan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Mereka mendapat izin dan perlindungan dari pejabat lokalnya. Bahkan beberapa di antaranya tergantung pada keuntungan perdagangan produk palsu sebagai sumber pendapatannya, sehingga mereka

¹³³ Mark Lam, John Graham, *op. cit.*, hal 334.

enggan untuk menindak tegas praktik ini, dan AS pun menganggap hal tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah China terhadap maraknya pembajakan hak cipta. Keenganan pemerintah untuk bertindak tegas disebabkan karena dengan menutup perusahaan tersebut berarti mimpi buruk bagi pemerintah lokal maupun nasional karena industri itu telah memperkerjakan jutaan orang, sehingga pemerintah cenderung menghindari kenaikan angka pengangguran yang akan berdampak bagi ekonomi, sosial, dan politik negaranya.¹³⁴

Pelanggaran lain yang merupakan mata rantai dari tindakan kejahatan ini adalah adanya penyeludupan. Praktik ini dapat mendorong masuknya produk palsu ke negara tetangga lalu mengalir hingga ke pasaran global. Praktik ini disinyalir karena kuatnya tingkat korupsi di China yang dapat membuat pejabat di perbatasan mau meloloskan produk palsu.¹³⁵

Dari segi penegakan hukum pun, China memiliki kelemahan karena AS menganggap toleransi ambang batas yang diberikan China terhadap para pelaku pembajakan terlalu tinggi, dan ini bertentangan dengan Perjanjian TRIPS Pasal 61 tentang prosedur kriminal. Tampaknya kata '*commercial scale*' dalam Pasal TRIPS tersebut dimanfaatkan China dalam penegakan prosedur kriminal pelanggaran hak cipta. Kata '*commercial scale*' tersebut diinterpretasikan China sebagai skala yang signifikan atau banyak jumlahnya. Di tahun 2007, sesaat sebelum AS mendaftarkan masalah pelaksanaan dan perlindungan HaKI China ke WTO, China telah menurunkan ambang batasnya dari 1000 buah produk bajakan per pelanggar menjadi 500 buah produk bajakan.¹³⁶ Dengan kata lain, jika pelanggar hak cipta memiliki barang bukti kurang dari 500 buah produk, maka ia akan terbebas dari jerat hukuman. Hal ini masih ditambah lagi dengan sikap China yang justru lebih keras kepada pelanggar aksi pornografi ketimbang aksi pembajakan, seringkali tuntutan pidana bagi para pelanggar yang tertangkap lebih ditujukan untuk pelanggar pornografi dan pelaku bisnis ilegal, bukan pembajakan.¹³⁷

¹³⁴ Oded Shenkar, *op. cit.*, hal 138.

¹³⁵ *Ibid.* hal 139.

¹³⁶ Megan Barnnet. *U.S. Files Trades Cases Against China on Piracy*. Diakses dari <http://www.portfolio.com/news-markets/top-5/2007/04/10/China-Piracy>, (waktu akses 15 Maret 2009, pukul 21.50 WIB).

¹³⁷ *IIPA 2002 Special 301 Report on People's Republic of China, op. cit.*

Peraturan lain China yang juga memperparah kerugian AS adalah peraturan tentang pembatasan akses pasar terhadap produk asing dalam hal ini produk AS dan sistem sensor yang berlaku di China yang terkesan kurang adil dan memakan waktu yang lama, yang membuat China tidaklah sejalan dengan prinsip *National Treatment* WTO.

Pembajakan yang dilakukan oleh China terhadap produk hak cipta AS, khususnya produk-produk film, musik dan rekaman, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak hiburan, buku/ jurnal, dan beberapa pelanggaran terkait lainnya, akan diuraikan pada subbab berikut ini yang akan menjelaskan bukti dan tingginya tingkat pembajakan produk hak cipta AS di China.

3.2.1 Pelanggaran Hak Cipta Produk AS Oleh China Tahun 2001-2007

Pembajakan terhadap produk-produk hak cipta di China biasanya dilakukan di pabrik yang memiliki izin dan dikerjakan setelah lewat jam kerja,¹³⁸ dan dengan kemampuan teknologi yang diadaptasi, baik pabrik yang memiliki izin atau tidak (misalnya VCD), mampu memproduksi sekitar 20.000 keping per hari dengan biaya sekitar 35 sen dolar AS per produksi.¹³⁹

Pembajakan produk berbasis cakram optik AS yang dilakukan China sangat mengganggu penjualan produk aslinya, apalagi produk ini sangat didominasi AS dalam perdagangan globalnya.¹⁴⁰ Hampir setiap film, musik, atau karya hak cipta lainnya produksi AS mampu menembus ke berbagai negara di dunia. Sehingga, pembajakan yang menimpa produk ini jelas membuat industri berbasis cakram optik AS mengalami kerugian di hampir setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari IIPA, pada Januari 2002 saja, diperkirakan terdapat 72 pabrik yang mengoperasikan 162 jalur replikasi dan produksi di China dengan kapasitas total produksi cakram optik adalah 567 juta unit per tahun. Tiap

¹³⁸ Sejak tahun 2000, pabrik-pabrik yang memiliki izin pun memproduksi barang-barang bajakan untuk memenuhi konsumsi domestik. *Ibid.*

¹³⁹ Shujen Wang, *op. cit.*

¹⁴⁰ Sepanjang 2001, produksi barang bajakan dari pabrik yang memiliki izin ataupun tidak terus berkembang, dan diperkirakan 80% pabrik di China memproduksi barang bajakan untuk memenuhi permintaan domestik. Diambil dari *IIPA 2002 Special 301 Report on People's Republic of China*, *op. cit.*

tahunnya angka ini terus naik, pada Januari 2003 terdapat 70 pabrik yang mengoperasikan 196 jalur replikasi dan produksi di China, dengan kapasitas total produksi cakram optik 690 juta unit per tahun. Tahun 2004 terdapat 71 pabrik, dengan perkiraan 569 jalur produksi. Tahun 2005 terdapat 83 pabrik resmi di China, dengan 765 jalur produksi, kapasitas total adalah 2,67 milyar unit per tahun, dan juga pembajak dapat dengan mudah mengganti-ganti produksinya mulai dari memproduksi CD, DVD, dan VCD ataupun CD-R. Total produksi yang dihasilkan itu dilatarbelakangi oleh permintaan domestik China untuk semua produk cakram optik, bisnis ini menjanjikan keuntungan yang besar, dan pencegahannya pun kurang di China. Parahnya lagi, pabrik dan kapasitas total produksi tersebut tidak mencakup pabrik-pabrik yang beroperasi secara diam-diam atau tidak memiliki izin.

Pembajakan terhadap produk cakram optik dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang mudah dan hampir dapat dilakukan oleh semua orang, hingga menggunakan teknologi yang canggih pula.¹⁴¹ Beberapa cara/modus yang digunakan untuk melakukan pembajakan pada cakram optik, khususnya yang berbentuk CD, VCD, ataupun DVD adalah dengan merekam langsung dari sebuah pertunjukkan (*bootleg*), mencuri hasil cetak film, kebocoran pada proses pasca produksi, kebocoran DVD asli sebelum tanggal rilisnya, dan berbagai cara lainnya. Kemudian hasil rekaman tersebut direproduksi dengan cara *burning* (duplikasi), ataupun disebar melalui jaringan internet, untuk selanjutnya diperjualbelikan. Cakram optik yang telah sampai pada jalur distribusi, biasanya disebar ke penjual baik itu pedagang besar, pedagang kecil (toko), pedagang eceran di pinggir jalan, bahkan oleh perorangan.¹⁴²

Tidak hanya menimpa produk cakram optik, pembajakan terhadap produk hak cipta AS pun menimpa produk lain seperti buku, *videogame*, baik dalam bentuk yang sederhana dalam kepingan cakram ataupun dalam media digital lainnya. Berikut merupakan data tingkat pembajakan di China tahun 2001-2007 terhadap produk AS yang dikategorikan berdasarkan jenis produknya, yaitu

¹⁴¹ *Film Piracy, Organized Crime, and Terrorism*. Hal 37. Diakses dari www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG742.pdf, (waktu akses 12 Maret 2009, pukul 09.12 WIB).

¹⁴² Untuk bagan modus pembajakan cakram optik dapat dilihat pada bagian lampiran 1 tesis ini.

produk film, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak hiburan, rekaman dan musik, buku/ jurnal, serta sekilas tentang pelanggaran lainnya yang terkait.

1. Pembajakan Produk Film

Adapun metode yang digunakan untuk menghitung tingkat pembajakan industri film adalah dihitung berdasarkan atas persentase kerugian dari pasar potensial terhadap pembajakan.¹⁴³ Perhitungan termasuk kerugian pajak, ukuran pasar yang resmi, potensi pasar yang resmi tanpa pembajakan.

Pelanggaran hak cipta atas produk film AS yang seringkali dilanggar China adalah berupa pembajakan atas DVD dan VCD.¹⁴⁴ Dua badan pemerintah China yang mengatur operasi dari industri media adalah *The State Administration of Radio, Film, and Television* (selanjutnya dalam tesis ini disebut SARFT) yang mengatur film (penerbitan dan distribusi film di teater/ bioskop), radio, dan televisi, sementara yang lainnya adalah *Ministry of Culture* (selanjutnya dalam tesis ini disebut MoC) yang mengatur bisnis distribusi dan impor *home video/ VCD*.

Pemerintah China memiliki batasan akses pasar yang cukup tidak adil terhadap film asing dengan adanya monopoli dari otoritas lokal yang ditunjuk. Pembatasan itu diantaranya adalah:¹⁴⁵

- Berdasarkan aturan SARFT, film impor yang diijinkan masuk ke China adalah 10 film per tahun dengan sistem bagi hasil antara pemerintah China dengan produsen film. Kemudian setelah masuknya China ke WTO, kuota film impor yang masuk ke China meningkat menjadi maksimal 20 film per tahun.¹⁴⁶ Sistem sensor dan monopoli produk import menjadi latar belakang kuota ini ditentukan. Pembajakan film di China banyak sekali menimpa film-film impor produksi Hollywood, karena peraturan masuknya 20 film impor per tahun sangat sulit untuk memuaskan permintaan dari konsumen China yang mengikuti perkembangan dunia hiburan. Di samping itu, proses sensor yang cenderung kurang adil terhadap film impor karena

¹⁴³ Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007spec301methodology.pdf>, (waktu akses 27 Maret 2009, pukul 22.13 WIB).

¹⁴⁴ Sejak tahun 1997 China mengizinkan impor film Amerika. Diambil dari Shujen Wang, *op. cit.*

¹⁴⁵ *IIPA 2005 Special 301 Report on People's Republic of China, op. cit.*

¹⁴⁶ Shujen Wang, *loc. cit.*

memakan waktu sangat lama membuat tanggal rilis China berada jauh di belakang tanggal rilis AS. Aturan tersebut jelas memberikan implikasi negatif bagi produsen film resminya, karena memancing tindakan pembajakan akibat batasan film yang masuk dalam sirkulasi pasar China. Kontrak yang tidak adil dalam perilis film di bioskop China pun, membuat distributor film hanya mendapat porsi kecil dari *box office* (sedangkan di negara lain pembagiannya adalah 50-50 antara bioskop dan distributor filmnya). Perlakuan ini menyebabkan lingkungan bisnis film di China tidak kompetitif.

- Di bawah SARFT, distribusi film bioskop merupakan monopoli pemerintah yang dilakukan melalui *China Film Corp.*
- SARFT mengatur bahwa film asing hanya boleh ada sepertiga dari total penayangan film di bioskop.
- Adanya '*black-outs period*' (masa penghentian). Pemerintah China mengeluarkan aturan ini sebagai masa di mana tidak ada pembagian hasil terhadap film laris asing yang telah dirilis. Ini ditujukan untuk menghindari persaingan saat film China juga dirilis dimasa yang sama. Larangan ini tentu saja mengurangi pendapatan pemilik hak cipta asing dan mampu meningkatkan aksi pembajakan, karena pembajak melihat permintaan konsumen akan film asing tersebut dengan menawarkan jasa *download* ilegal dari internet dan pembajakan DVD/ VCD.
- *China Film* mengatur bahwa cetakan film harus dibuat di laboratorium lokal. Sehingga hal ini dapat mengurangi keleluasaan pemilik hak untuk mengawasi kualitas dari cetakan film, serta menambah pengeluaran.
- Bea impor film bioskop dan harga DVD/ VCD harus ditaksir berdasarkan potensi royalti dari film impor tersebut. Aturan ini tidak konsisten dengan kebiasaan internasional yang menaksir berdasarkan nilai pokok dari kondisi fisik.

Tabel 3.2 berikut ini akan memperlihatkan tingkat pembajakan China terhadap produk film AS tahun 2001-2007:

Tabel 3.2
Estimasi Tingkat Pembajakan Produk Film AS di China
Periode 2001-2007

Tahun Industri	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Film	88%	91%	95%	95%	93%	NA ¹⁴⁷	NA

Sumber: Data telah diolah kembali dari *IIPA 2002-2008 Special 301 Report: People's Republic of China*. Diakses dari <http://www.iipa.com>, (waktu akses 27 Maret 2009, pukul 11.15 WIB).

Produsen VCD ataupun DVD bajakan pun semakin banyak tiap tahunnya, tercatat untuk sepanjang tahun 2001 saja terdapat 700 judul film produksi industri film AS dalam *Motion Picture Association of America, Inc* yang dibajak dalam bentuk DVD dan telah rilis di China, lalu di tahun 2002, jumlahnya meningkat menjadi hampir 900 judul film.

Film-film bajakan itu pun dijual dengan harga yang jauh di bawah pasaran, sekitar 1,02-2,50 dolar AS per DVD. Sedangkan untuk VCD misalnya, ketika konsumen diberi pilihan untuk menyewa VCD lama seharga 25-35 sen dolar AS, atau membeli VCD film terbaru seharga sekitar 60 sen-1,20 dolar AS (tergantung pada lokasi), melihat kondisi itu sepertinya konsumen akan lebih memilih membeli produk bajakannya. Bahkan harga produk-produk bajakan tersebut jauh lebih murah daripada harga tiket masuk bioskop, di mana harga tiket masuk teater di Beijing rata-rata adalah 4 hingga 5 dolar AS.¹⁴⁸

Salah satu distributor film AS di China misalnya, mengatakan bahwa pihaknya telah menjual 300.000 kopi film *Titanic* asli, namun versi bajakan film tersebut telah terjual sebanyak 20 juta hingga 25 juta. Pembajakan ini telah membuat para distributor film resmi kehilangan kesempatan untuk produknya terjual dengan perbandingan 35:1. Atau beberapa minggu setelah keluarnya film *How The Grinch Stole The Christmas*, VCD versi bajakannya telah beredar di pasaran dengan harga 1,20 sen dolar AS per keping.

¹⁴⁷ *Not Available*. Baik IIPA ataupun MPA belum menyediakan data tahun 2006 dan 2007.

¹⁴⁸ *IIPA 2005 Special 301 Report on People's Republic of China, op. cit.*, hal 188.

New York Times pun pernah memuat bagaimana film *Gladiator* dibajak di China yaitu dengan direkam menggunakan *camcorder* (*camera recorder*) di bioskop, lalu versi bajakannya dikeluarkan dengan *cover* bertuliskan ‘*cinema version*’ dan harga kurang dari 2 dolar AS.

Semua contoh di atas menunjukkan betapa canggihnya operasi pembajakan di China serta menunjukkan betapa besarnya permintaan domestik China sendiri.

Pembajakan di China bisa dikatakan tak pandang bulu, buktinya tidak hanya film produksi AS yang dibajak, film produksi China sendiri pun dibajak. Oktober 2002, di Shenzhen, Zhang Yimou, seorang sutradara terkenal China mengeluarkan film besutan terbarunya berjudul *Hero*. Para penonton yang datang dilarang membawa masuk tas mereka atau apapun yang terbuat dari metal ke dalam bioskop selama pemutaran film untuk menghindari perekaman lewat *camcorder*. Distributor film ini telah mengeluarkan uang 1 juta RMB (setara 120,800 dolar AS) untuk melaksanakan program tersebut. Tetapi pada kenyataannya beberapa hari kemudian, VCD dan DVD bajakannya telah beredar di jalanan. 8 Januari 2003, sebuah bioskop di Xi’an melaporkan kehilangan *copy* asli film tersebut. Polisi pun kemudian berupaya mencari pelakunya, namun kemudian diketahui bahwa pelakunya telah bunuh diri dengan melompat dari gedung. Distributor untuk DVD aslinya lalu melanggar kontraknya dengan distributor film dan langsung mulai menjual DVD bajakannya sebelum itu dinyatakan resmi untuk diedarkan pada 20 Februari 2003. Peristiwa ini menimpa film produksi China sendiri, jadi keadaannya pasti akan lebih banyak celah untuk film produksi AS.

2. Pembajakan Aplikasi Perangkat Lunak Bisnis

Aplikasi perangkat lunak bisnis merupakan perangkat lunak yang biasa digunakan oleh instansi-instansi baik itu pemerintahan ataupun swasta untuk keperluan urusan perkantoran. Adapun metode yang digunakan untuk menghitung tingkat pembajakan industri aplikasi perangkat lunak bisnis adalah dengan dihitung berdasarkan selisih antara aplikasi perangkat lunak yang telah terpasang (yang mewakili permintaan) dengan jumlah perangkat

yang dipasok oleh produsen ke pasaran.¹⁴⁹ Penghitungan itu akan menghasilkan perkiraan persentase jumlah perangkat lunak bajakan di satu negara dalam satu tahun.

Perangkat lunak bajakan tersebut biasa digunakan oleh kantor-kantor pemerintah China (penggunaan perangkat lunak di pemerintahan diawasi oleh NCA) dan perusahaan-perusahaan China. Namun setengah dari produksi perangkat lunak bajakan ini digunakan hanya untuk di perusahaan-perusahaan China saja. Pembajakan biasa dilakukan dengan kerjasama antara pabrik komputer, distributor, dan toko penjual yang telah memasukkan perangkat lunak bajakan ke dalam konten komputer sebelum sebelum komputernya terjual.¹⁵⁰

Masalah pembajakan perangkat lunak di China ini tergolong tinggi dan telah menjadi komoditas ekspor, sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah China. Dari laporan IIPA tahun 2002, kebanyakan pembajak perangkat lunak yang memiliki sistem yang canggih untuk dipasarkan hampir di seluruh dunia berasal dan diproduksi dari China bagian selatan.

Penggunaan perangkat lunak bajakan mengakibatkan kerugian yang cukup tinggi bagi industri perangkat lunak AS, dan untuk membantu menangani ini, pemerintah lokal mengeluarkan tata tertib ke pasaran untuk tidak menjual *copy* perangkat lunak yang palsu atau mengisi aplikasi perangkat lunak palsu di komputer sebelum dijual. Industri perangkat lunak AS sangat berharap pemerintah China memiliki aturan administratif dan hukum yang jelas dan efektif dalam menangani masalah ini, karena penggunaannya tidak sebatas pada khalayak umum melainkan juga dinikmati oleh pemerintah.

Tabel 3.3 berikut memuat data tingkat pembajakan China terhadap aplikasi perangkat lunak bisnis produksi AS tahun 2001-2007:

¹⁴⁹ Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007spec301methodology.pdf>, *op. cit.*

¹⁵⁰ Dalam sebuah wawancara, seperti dikutip Mark Lam dan John L. Graham dalam bukunya *China Now* (hal 342), Bill Gates yang merupakan pengusaha perangkat lunak mengatakan bahwa walaupun sekitar 3 juta komputer terjual setiap tahunnya di China, tetapi masyarakat China tidak membeli/ membayar untuk perangkat lunak asli.

Tabel 3.3
Estimasi Tingkat Pembajakan Produk Aplikasi Perangkat Lunak
Bisnis AS di China Periode 2001-2007

Tahun Industri	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Aplikasi perangkat lunak bisnis	92%	92%	92%	90%	86%	82%	80%

Sumber: Data telah diolah kembali dari *IIPA 2002-2008 Special 301 Report: People's Republic of China*. Diakses dari <http://www.iipa.com>. (waktu akses 27 Maret 2009, pukul 11.15 WIB).

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pembajakan aplikasi perangkat lunak cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun walau tidak signifikan. Hal ini terjadi karena pemerintah telah mengeluarkan peringatan agar seluruh instansi pemerintah China menggunakan perangkat lunak yang asli. Peringatan ini terus dijalankan sejak tahun 1999, dan peringatan yang dikenal dengan istilah *red top decree* ini juga diteruskan tidak hanya di instansi pemerintah, tetapi juga di kalangan perusahaan swasta China. Namun, walau tingkat pembajakannya menunjukkan perubahan tiap tahunnya karena penggunaan perangkat lunak asli mulai efektif di kantor-kantor pemerintahan, penggunaan perangkat lunak bajakan di sektor swasta dan perusahaan asing masih berlangsung karena China bersikeras jika penggunaan perangkat lunak bajakan di lingkungan bisnis komersil tidaklah salah.

Di tahun 2001, pemerintah juga menetapkan kalau *Ministry of Finance* akan memberikan *budget khusus* pembelian perangkat lunak asli, ini untuk memastikan kalau instansi pemerintah memiliki dana untuk membeli perangkat lunak yang asli.

Masih di tahun yang sama, seorang wanita berkebangsaan China-Amerika bernama Gao Zhan (menerima gelar Ph.D. Sosiologi dari Universitas Syracuse tahun 1997 dan menjadi peneliti di Universitas Amerika di Washington D.C.) melakukan penelitian di China, tetapi kemudian di tahan karena menjadi mata-mata untuk Taiwan. Karena itu, ia divonis 10 tahun di penjara. Penahanannya ternyata memicu protes dari organisasi-organisasi hak asasi manusia di dunia.

Untuk itu, AS pun bertindak dengan mengabdikan permintaannya menjadi warga negara AS. Ia kemudian dibebaskan Juli 2001, dan disambut baik oleh Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell. Dua tahun kemudian, tepatnya November 2003, ia kembali ke pengadilan tetapi kali ini di pengadilan AS, karena ia terbukti menjadi mata-mata untuk China. Dengan menggunakan nama palsu Gail Heights dan mengaku sebagai afiliasi Universitas George Mason, ia mengirimkan komponen berteknologi tinggi dari perusahaan AS senilai 1,5 juta dolar AS, termasuk mikroprosesor yang dapat digunakan untuk keperluan militer, ke China.¹⁵¹

3. Pembajakan perangkat lunak hiburan

Perangkat lunak hiburan terdiri dari 3 jenis, yaitu *PC-based games* atau biasa dikenal dengan permainan yang berbentuk CD untuk digunakan pada PC komputer. *Console-based games* merupakan permainan berbentuk CD yang digunakan pada alat tertentu, *Playstation* misalnya. *Cartridge-based games* merupakan permainan yang berbentuk kaset untuk digunakan pada alat tertentu, misalnya *Gameboy* yang diproduksi oleh *Nintendo*.

Pembatasan akses pasar pun berlaku pada produk perangkat hiburan/*videogame* ini. Perangkat lunak hiburan juga menghadapi penundaan yang cukup lama dalam proses penerimaan dan sensor di China, sehingga dapat menghapus peluang-peluang bagi distribusi produk yang asli. Tiap produk harus melalui proses persetujuan dari GAPP, yang memakan waktu beberapa minggu bahkan bulanan. Selain itu, masih harus melalui proses penerimaan dari *Ministry of Culture* untuk *game online*. Untuk itu, karena perangkat lunak hiburan dapat diaplikasikan ke dalam berbagai media, termasuk PC komputer, *console*, *handled device*, dan internet, maka dilakukan dua pengawasan dari GAPP dan MoC. Dua proses penerimaan yang terpisah ini memakan waktu dan menghambat waktu rilis ke pasaran. Di samping itu, transparansi dalam proses ini pun masih dipertanyakan oleh industri yang bersangkutan.

¹⁵¹ Doron Ben-Atar. *US Path to Wealth and Power: Intellectual Piracy and The Making of Industrial America*. Fordham University. Diakses dari <http://osdir.com/ml/culture.india.sarai.reader/2005-02/msg00006.html>, (waktu akses 17 Februari 2009, pukul 07.07 WIB).

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat pembajakan industri perangkat lunak hiburan adalah dihitung dari angka perkiraan yang disediakan oleh perwakilan perusahaan baik anggota maupun non-anggota, distributor, dan petugas pelaksana berdasarkan pada kondisi pasar lokal.¹⁵² Penghitungan tiap jenis perangkat biasanya dilakukan secara terpisah, tetapi kemudian dihitung rata-rata seluruh pembajakan di pasaran.

Tabel 3.4 berikut ini memuat data tingkat pembajakan China terhadap perangkat lunak hiburan produksi AS tahun 2001-2007:

Tabel 3.4
Estimasi Tingkat Pembajakan Produk Perangkat Lunak Hiburan AS di China Periode 2001-2007

Tahun Industri	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Perangkat lunak Hiburan	92%	96%	96%	90%	92%	NA	95%

Sumber: Data telah diolah kembali dari *IIPA 2002-2008 Special 301 Report: People's Republic of China*. Diakses dari <http://www.iipa.com>. (waktu akses 27 Maret 2009, pukul 11.15 WIB).

Berdasarkan laporan IIPA untuk tahun 2002 saja, produksi *PC-based games* bajakan di China mencapai 94%, dan *console-based games* mencapai 97%. Pembajakan biasanya dilakukan oleh dengan cara *CD-R burning* yang relatif mudah dan murah dan dengan *men-download* permainan melalui internet secara ilegal. *CD console based game* bajakan dijual dengan harga antara 85 sen-3 dolar AS, dengan perbandingan harga aslinya adalah 20 dolar AS (padahal harga ini merupakan harga khusus untuk pasar China yang jauh lebih murah dari harga pasar AS).

Produk bajakan *videogames* ini pun banyak yang memiliki kualitas tinggi, misalnya saja *games The Lord of the Rings* yang dapat ditemukan hampir di seluruh China, lengkap dengan kemasan dan manual instruksinya.

¹⁵² Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007spec301methodology.pdf>, *op. cit.*

Pembajakan yang menimpa produk kaset *game boy (cartridge based)* dari Nintendo pun cukup tinggi, untuk tahun 2002 saja ditemukan 1 juta produk palsu kaset palsu. Pembajakan produk-produk *videogame* ini biasanya dilakukan dengan melakukan pembelian komponen dari Taiwan, lalu dikirim ke China untuk proses terakhirnya, dan diperkirakan 70% dari produk ini diproduksi domestik. Produk Nintendo yang palsu terus bermunculan dan diekspor ke wilayah Asia, Amerika Latin, Timur Tengah dan Eropa. Tahun 2006 saja, terdapat lebih dari 7500 produk Nintendo palsu yang berasal dari China disita di 13 negara. Operasi penyeludupan ini biasanya menjadikan Hongkong sebagai titik pengiriman, dan lebih dari 34.000 produk Nintendo palsu dikirim melalui pelabuhan Hongkong pada tahun 2006.

Permainan *online* melalui internet kini sedang marak di China, tercatat pertumbuhan *café-café* internet hingga tahun 2007 yang menyediakan jasa permainan *online* pun tinggi mencapai sekitar 220.000 tempat. Walau permainannya berbentuk *online*, tetap saja memberi kerugian bagi produsen permainan karena biasanya dalam satu *café* internet, hanya satu komputer yang menggunakan perangkat lunak asli, sedangkan yang lainnya hanya meng-*copy* perangkat lunak tadi. Di samping itu, penindakan yang dilakukan pemerintah China terhadap *café* internet dan kontennya lebih kepada pelanggaran pornografi, untuk itu seharusnya pemerintah China berlaku sama bagi pembajakan *videogame* ataupun konten hak cipta lain seperti film dan *file* lagu.

4. Pembajakan Produk Rekaman dan Musik

Pembajakan produk rekaman dan musik dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya saja dengan melakukan penggandaan album yang sedang laku di pasaran dengan meniru persis mulai dari *cover*, kemasan, hingga isinya. Cara yang lain adalah dengan memilih beberapa lagu yang sedang *hit* (dari berbagai album) di pasaran, untuk kemudian digabungkan dalam satu album atau biasa dikenal dengan istilah album seleksi. Kedua cara di atas biasanya menghasilkan sebuah album berbentuk CD. Namun ada produk lain yang bisa dinikmati tidak hanya audio, tetapi juga visual, melalui VCD/ DVD lagu. Pembajakan VCD/ DVD lagu ini dikenal dengan istilah *bootleg* yang berarti

pembajakan dilakukan saat penyanyi tengah melakukan pertunjukan di panggung, biasanya pembajak merekam pertunjukan tersebut dalam *camcorder* tersembunyi.

Pembatasan akses pasar bagi industri rekaman juga berlaku di China yaitu bahwa perusahaan rekaman dan musik AS harus memiliki lisensi pada perusahaan rekaman China untuk memproduksi rekamannya di pasar China. Selain itu, adapun impor CD harus melalui *China National Publication Import and Export Control*.

Akses pasar yang berlaku bagi industri rekaman AS pun terhambat karena industri rekaman yang masuk ke China dicegah untuk melirik *talent-talent* atau orang-orang yang memiliki bakat/ bibit sebagai penyanyi di China, serta terbatas dalam memasarkan produk aslinya di pasaran. Industri rekaman AS bisa dibilang sudah piawai dalam mencari dan mengembangkan bakat-bakat seseorang, termasuk untuk warga China, bahkan membuatnya terkenal tidak hanya di China saja, namun karena keterbatasan gerak yang ada maka industri rekaman AS pun tidak dapat berbuat banyak, padahal jika hal ini diizinkan oleh pemerintah China maka kehadiran industri rekaman AS di China dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Industri rekaman AS juga tidak dapat merilis produk rekamannya tanpa izin dari perusahaan pemerintah, dan tidak dapat mendistribusikan atau menjual produknya ke pasar China kecuali melalui *joint venture* dengan persentase yang minim dengan perusahaan setempat, sehingga hal ini membuat sulit perusahaan asli untuk berpartisipasi.

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat pembajakan terhadap produk rekaman dan musik adalah dengan mengumpulkan data pasar dari industri lokal atau dari perwakilan yang bertanggung jawab untuk daerah tertentu. Perkiraan yang dilakukan berdasarkan atas suvey lokal terhadap kondisi pasar di tiap daerah.¹⁵³

Tabel 3.5 berikut ini memuat data tingkat pembajakan China terhadap rekaman dan musik produksi AS tahun 2001-2007:

¹⁵³ Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007spec301methodology.pdf>, *op. cit*

Tabel 3.5
Estimasi Tingkat Pembajakan Produk Rekaman dan Musik AS di China
Periode 2001-2007

Tahun Industri	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Rekaman & musik	90%	90%	90%	85%	85%	85%	90%

Sumber: Data telah diolah kembali dari *IIPA 2001-2008 Special 301 Report: People's Republic of China*. Diakses dari <http://www.iipa.com>. (waktu akses 27 Maret 2009, pukul 11.15 WIB).

Pembajakan produk rekaman dan musik yang saat ini marak dilakukan adalah *men-download* melalui situs-situs yang menyediakan *file-file* MP3 bajakan. Biasanya situs-situs tersebut menyediakan 20-30 *file* lagu yang dapat di *download* dari tiap album penyanyi terkenal. Pelaku pembajakan biasanya juga melakukan pembelian nomor penerbitan dari penerbit audiovisual yang sah, di mana hal ini dilakukan oleh penerbit sah semata hanya untuk *survive*.

Tahun 2002, selain produk CD/ VCD/ DVD musik, kurang lebih 39% produksi kaset (masih menggunakan pita hitam) masih meramaikan sirkulasi produk rekaman dan musik di China, di mana 50% produksi kaset tersebut diperuntukkan di daerah pedesaan, dan hampir keseluruhan produk ini adalah bajakan.¹⁵⁴

Tempat penjualan rekaman bajakan ini biasa ditemukan di toko-toko musik kecil, di mana lebih dari setengah toko ini menjual produk rekaman bajakan. Di Beijing sendiri terdapat sekitar 1.500 toko musik yang menjual produk bajakan.

Misalnya saja, pada sebuah toko yang menjual produk film dan musik di sebuah mal elit di Beijing yang sering dikunjungi oleh orang asing pun tak luput dari penjualan produk bajakan. Harga yang tertera pada CD lagu baik album penyanyi tertentu ataupun album kompilasi, tergolong sangat murah. Jika dibandingkan dengan penjualan CD di Jakarta, biasa satu CD di Jakarta dihargai mulai dari Rp. 75.000 sampai ada yang harganya di atas Rp.120.000,

¹⁵⁴*IIPA 2003 Special 301 Report: People's Republic of China*. Diakses dari <http://www.iipa.com/rbc/2003/2003SPEC301PRC.pdf>, (waktu akses 26 Maret 2009, pukul 19.15 WIB)

maka toko di mal tersebut menjual CD dengan harga mulai dari Rp.17.000. Dilihat dari wujudnya, sangat sulit untuk mengetahui apakah CD tersebut asli atau bajakan, karena kemasan yang ditawarkan sangat bagus, sehingga tidak akan terpikir kalau itu adalah CD bajakan. Namun kemudian diketahui bahwa semua produk itu bajakan, sama seperti CD yang sering dijual di pinggir jalan Glodok, hanya saja CD versi China itu memiliki kualitas yang jauh lebih bagus dan menjual.¹⁵⁵

5. Pembajakan Buku dan Jurnal

Cara yang digunakan untuk menghitung tingkat pembajakan buku dan jurnal produksi AS adalah berdasarkan pada ketersediaan buku ataupun jurnal versi bajakan dan fotokopi ilegal yang diperbanyak, terutama yang ditemukan di dalam ataupun sekitar lingkungan institusi pendidikan, toko buku ataupun toko-toko yang ada di pinggir jalan.¹⁵⁶

Pembajakan dan pembatasan akses pasar terhadap buku dan jurnal banyak menghambat perkembangan pasar penjualan buku/ jurnal yang asli. Walaupun telah ada beberapa lisensi penerbit resmi di China, dan beberapa aksi pembajakan pun telah ditindak (dengan tindakan administrasi dan denda yang kecil), pembajakan terhadap hasil karya tulis AS tidak kunjung reda, sehingga hampir tiap tahunnya tidak banyak perubahan/ perbaikan dari tingginya pembajakan buku/ jurnal baik yang melalui, cetakan palsu, internet, ataupun fotokopi. Penerbit buku dan jurnal AS menderita pembajakan dalam 3 hal; percetakan ilegal terhadap buku akademis ataupun buku *bestseller* komersil, fotokopi dalam jumlah tertentu tanpa izin, dan pembajakan melalui internet terhadap jurnal akademis dan *professional online* serta situs yang menawarkan jasa *download* buku. Biasanya modus yang digunakan untuk melakukan pembajakan melalui internet adalah pencurian nomor PIN untuk *download* jurnal *online*.

Pembatasan akses pasar bagi industri penerbitan buku dan jurnal meliputi hal-hal berikut:

¹⁵⁵ Berdasarkan pengalaman pribadi penulis ketika belajar Bahasa Mandarin di Beijing pada tahun 2005 hingga tahun 2007.

¹⁵⁶ Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007spec301methodology.pdf>, *op. cit*

- Perusahaan asing dilarang untuk mengimpor materi ke China, karena impor dibatasi hanya untuk 38 perusahaan milik pemerintah. Padahal berdasarkan aturan WTO, perusahaan asing seharusnya diizinkan untuk mengimpor sendiri produk mereka. Hingga pada 11 Desember 2004, pemerintah China menghapus aturan ini, sehingga penerbit boleh mengimpor langsung produknya ke China.¹⁵⁷
- Perusahaan/ penerbit asing tersebut hanya diizinkan mendistribusikan saja produk mereka, dan dilarang dalam proses percetakannya.
- Tidak hanya itu, perolehan ISBN atau ISSN dan proses editorial untuk pasar China juga sangat terbatas bagi penerbit asing. Sehingga keterbatasan ini mengakibatkan pengeluaran yang besar bagi penerbit dan bagi konsumen itu sendiri, menghambat waktu penerbitan, serta kurangnya transparansi penyebaran produk aslinya, dan hal itu semua dapat memancing tindak pembajakan.
- Tingginya biaya untuk mengakses *server* asing yang dikelola oleh *China Education and Research Network* (selanjutnya dalam tesis ini disebut CERNET) mengakibatkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan bagi penerbit agar jurnalnya dapat ditampilkan, sehingga hal ini membuat pilihan yang terbatas bagi pelajar di China.

Mayoritas pembajakan terhadap buku dan jurnal ini terjadi di institusi pendidikan dan komunitas ilmuwan. Konsumen jurnal-jurnal berlangganan untuk bidang *science* dan profesional dapat dikatakan tidak ada, padahal jumlah murid dan institusi penelitian di China, serta para profesionalnya semakin meningkat. IIPA mencontohkan, hingga tahun 2001 hanya ada sekitar sembilan yang terdaftar sebagai pelanggan *Chemical Abstract* (jurnal dan *database* yang paling penting di bidang kimiawi) yang dibeli oleh seluruh pemerintahan China. Diperkirakan, pembajakan jurnal berada pada kisaran 50%-90% dari hampir 1.000 universitas yang ada di China yang sekiranya membutuhkan jurnal. Penerbit sangat prihatin pada distribusi buku untuk pelajar di universitas-universitas, beberapa universitas bahkan memproduksi sendiri sampulnya untuk buku-buku ilegal.

¹⁵⁷ IIPA 2005 *Special 301 Report on People's Republic of China*, *op. cit.*, hal 211.

Tak seorang pun akan mendapat ijin penerbitan sebelum mendapat lisensi penerbitan berupa nomor ISBN. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh penerbit lokal dengan menjual nomor ISBN kepada para calon penerbit, untuk lalu menerbitkan buku terjemahan yang ilegal. Banyak terdapat terjemahan palsu dari buku cetak maupun buku *bestsellers* yang dipasarkan di kota besar, kecil dan propinsi. Bahkan ketika berlangsung *Beijing International Book Fair*, di sepanjang trotoar di sekeliling lokasi acara tersebut, masih tetap dapat ditemukan buku-buku komersil bajakan seperti *The Da Vinci Code* karya Dan Brown, buku karangan Bill Clinton berjudul *My Life* dan novel karangan pengarang Inggris yang terkenal J.K Rowling berjudul *Harry Potter and the Order of the Phoenix*.

Jilid keenam serial novel *Harry Potter* misalnya, terbit di China berbulan-bulan sebelum J.K. Rowling menulisnya. Ketika novel itu secara resmi diluncurkan, beberapa pembajak China bersaing untuk menerjemahkannya dan menjualnya secara *online*. Bahkan, sejumlah penerjemah yang tidak puas dengan akhir dari cerita novel itu, menulis akhir versi mereka sendiri.¹⁵⁸ Sedangkan penerbit China yang sah, mengeluarkan 17.000 dolar AS untuk 3 seri pertama novel *Harry Potter*. Penerbitnya pun yakin kalau bukunya tak lama kemudian pasti akan dibajak sehingga ia tidak mengharapkan keuntungan yang signifikan dari penjualan. Dan ternyata ia benar, karena segera setelah bukunya diterbitkan banyak buku *Harry Potter* bajakan yang dijual, bahkan ke dalam beberapa edisi.¹⁵⁹ Hingga tahun 2003, penerbit lokal menjual lebih dari 5,5 juta kopi buku *Harry Potter*. Namun sayang, versi bajakannya juga terjual dengan kuantitas yang sama.

Tak hanya itu, kreativitas pembajak China sangatlah tinggi, penerbit menerbitkan buku tambahan/ lain tentang *Harry Potter* dengan menggunakan nama J.K. Rowling. Untuk itu, salah satu penerbit tertangkap melakukan ini dan didenda 2.500 dolar AS.

Dampak dari maraknya pembajakan buku dan jurnal di China sebenarnya juga menimpa perusahaan penerbit lokal. *China Daily* melaporkan bahwa

¹⁵⁸ James Kyngge, *op. cit.*, hal 81.

¹⁵⁹ *IIPA 2005 Special 301 Report on People's Republic of China*, *op. cit.*, hal 193.

pembajakan atas buku cetak bahasa Inggris yang paling terkenal di China, *College English*, mengalami kerugian 2,4 juta dolar AS hanya untuk distributor China saja, *The Shanghai Foreign Language Education Press*. Buku program Bahasa Inggris seringkali dibajak dengan rapi, kualitas yang tinggi, dan menggunakan materi berwarna, kemudian dipebanyak dan didistribusikan ke pasar. Selain buku-buku bahasa, buku-buku medis asing pun sering dibajak.

Industri penerbitan buku dan jurnal juga merasakan besarnya pengaruh fasilitas internet terhadap pembajakan. Proses yang semakin mudah dengan melakukan *scan* terhadap buku akademis ataupun buku komersil *bestseller* yang kemudian dijual dalam format PDF, memancing pembajak untuk meng-*copy* format tersebut, untuk kemudian disebarakan lagi dan dijual dengan harga dan keuntungan yang kompetitif dengan produk aslinya.

Saat negosiasi antara pemerintah China dengan *World Bank* dalam rangka pemberian pinjaman untuk bidang pendidikan, tawaran dana *World Bank* untuk meningkatkan koleksi jurnal di China ditolak oleh pemerintah, dengan alasannya adalah: *'journal are purchased domestically!'*

Selain versi cetakan palsu, pembajakan juga dilakukan dengan memperbanyak menggunakan mesin fotokopi, dan hal ini membuat sulitnya penghitungan tingkat pembajakan karena setiap orang dapat memperbanyaknya sendiri. Di tahun 2004, modus pembajakan melalui fotokopi ini meningkat karena biaya kertas fotokopi yang turun.

6. Pelanggaran Lainnya

Di samping pembajakan yang secara langsung terjadi pada produk-produk hak cipta AS, khususnya produk film, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak hiburan, rekaman dan musik, serta buku/ jurnal, masih ada beberapa pelanggaran terkait lainnya yang merupakan dari mata rantai dari pembajakan produk AS tersebut. Sehingga Pembajakan di tingkat pedagang besar sampai kecil dan melalui internet, terus merajalela, walau pemerintah baik di tingkat propinsi maupun pusat, dan cukai, ataupun kerjasama dengan industri AS

telah melakukan razia besar-besaran tiap tahunnya. Pelanggaran lainnya yang terkait dengan pembajakan produk hak cipta AS diantaranya adalah:¹⁶⁰

- Penyeludupan

Produk-produk bajakan kini juga diekspor dan dapat ditemukan di beberapa negara, seperti Rusia, Thailand, Vietnam, Australia, Jerman, Inggris, Italia, Meksiko, AS, dan di kota-kota besar lainnya. Pengiriman dilakukan dengan cara disembunyikan melalui pengiriman *container* elektronik atau produk lainnya, atau melalui kiriman kilat dan perusahaan kurir.

Tahun 2003 saja disita sekitar 75,8 juta VCD, dan 7,96 juta DVD, termasuk yang ditemukan di perbatasan untuk diseludupkan melalui Hongkong dan Macau. 6 bulan pertama di tahun yang sama, ekspor film bajakan juga telah mencapai AS, berdasarkan hasil statistik *Departement of Homeland Security* AS, disita barang-barang asal China ke AS senilai 1,7 juta dolar AS. Jadi di samping masalah yang cukup kompleks di pasar dalam negeri China, industri AS menganggap produk bajakan yang di ekspor oleh China tidak dapat disepelekan.¹⁶¹ Apalagi pada tahun 2005 China membuat format baru cakram optik HD-DVD yang tidak akan cocok dengan DVD *player* yang ada selama ini untuk pasaran dalam negeri dan ekspornya, dan hal ini akan memperparah keadaan karena tidak dilindungi oleh peraturan perlindungan hak cipta yang ada saat ini.

Selain produk berbasis cakram optik, *videogame cartridge-based game* juga mengalami hal serupa. Komponen dan sirkuit *game* berasal dari Taiwan, lalu dirakit di China untuk konsumsi domestik dan ekspor. China menjadi eksportir utama dunia dalam *videogame* bajakan bermerek Nintendo. Tahun 2005, total 244.000

¹⁶⁰ *IIPA 2002-2008 Special 301 Report: People's Republic of China*. Diakses dari <http://www.iipa.com>. (waktu akses 27 Maret 2009, pukul 11.15 WIB).

¹⁶¹ Ekspor produk bajakan audio dan video yang dilakukan China sempat mempengaruhi hubungan dagang AS-China dengan hampir dilakukannya tindak balasan dan larangan kegiatan ekspor produk bajakan oleh pemerintah AS tahun 1996 dan 1997.

produk Nintendo palsu yang berasal dari China, disita di 15 negara di Asia, Amerika Latin, Amerika Utara, Timur Tengah dan Eropa. Pelanggaran ini dapat terjadi karena kurangnya tindakan tegas terhadap pabrik-pabrik terkait pembajakan dan kurang efektifnya prosedur inspeksi cukai sebelum barangnya meninggalkan China.

Contoh lainnya adalah produk buku, di tahun 2002, penerbit China, *Duoli International* yang bermarkas di Guangzhou, telah mengirimkan dalam kuantitas yang besar buku-buku bajakan ke Afrika, tepatnya Nigeria. Masalah yang sama juga menimpa produk rekaman yang versi bajakannya telah tersebar ke pasar Asia Pasifik, Australia, dan Singapura. Apalagi ada tren baru yang menggabungkan barang bajakan dengan kualitas tinggi, sehingga sulit dibedakan dengan versi aslinya dan membuat proses deteksi-identifikasi semakin sulit.

- Pembajakan pada fasilitas umum

Masalah lain yang juga menimpa film-film produksi AS adalah, terkadang film AS yang belum resmi di rilis, sudah dapat kita lihat tayangannya (versi bajakannya) di fasilitas-fasilitas publik, seperti hotel, klub, teater mini, bahkan fasilitas pemerintah. Peristiwa ini seringkali disengaja untuk menyaingi produsen penerbit resminya di bioskop, dan hal ini sangat mengancam kelangsungan bioskop-bioskop resmi di China. Pemerintah telah melakukan beberapa hal untuk melawan aksi ini, tetapi penindakan yang dilakukan didasarkan pada pemberantasan pornografi, bukan perlindungan hak cipta.

Pembajakan pun terjadi di siaran TV lokal China. Ini terjadi karena ketatnya dan pembatasan akses pasar yang dibelakukan pemerintah China untuk sektor penyiaran TV. Misalnya saja, saluran TV asing asing hanya boleh ditayangkan di hotel berbintang 3 ke atas dan di institusi asing. Selain itu, saluran TV satelit asing tidak diizinkan untuk masuk dalam jaringan lokal tanpa persetujuan pemerintah.

Aturan SARFT yang mengatur impor dan penayangan program TV asing berlaku efektif sejak 23 Oktober 2004, yang berisi tentang kuota dalam penayangan tayangan asing, yaitu tidak lebih dari 25% dari seluruh tayangan dan 0% pada waktu tayang primer. Program asing lain seperti berita, dokumentasi, *talk show*, *travel show* tidak lebih dari 15% dari total tayang setiap harinya. Program animasi asing tidak lebih dari 40% dari total program animasi di tiap stasiun TV. Penerimaan program asing tersebut dilakukan oleh *The China TV Program Agency* (atau disebut CCTV) dengan pengendalian dari SARFT. Pemerintah China juga mengatur tentang siapa yang dapat melakukan investasi dan program apa yang dapat diproduksi di China. Oleh karena itulah, pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah China ini membuat banyak pihak melakukan pembajakan demi untuk memuaskan permintaan konsumen.

Terdapat sekitar 38 stasiun penyiaran TV propinsi dan 368 stasiun TV lokal, yang semuanya dijalankan oleh pemerintah, dan memenuhi kebutuhan sekitar 300 juta keluarga. Stasiun-stasiun ini biasanya menggunakan program siaran yang tidak sah dan tanpa izin, termasuk film-film produksi AS. Stasiun-stasiun ini biasanya bergantung pada cara-cara curang dengan menggunakan 'izin' atau 'surat otorisasi' dari perusahaan-perusahaan film di Hongkong atau Thailand, yang mengakui memiliki izin atas judul-judul film tersebut, sehingga kondisi ini sulit untuk dikendalikan. Beberapa stasiun bahkan mengedit film-film produksi MPA dengan status samaran '*introduction to film*'. Hal yang sama juga menimpa komposer musik AS yang melihat tidak adanya upaya serius pemerintah China untuk menangani penayangan musik mereka hotel, bar, dan fasilitas publik lainnya. Ini adalah hak dasar dari TRIPS dan IIPA tidak melihat upaya apapun yang dilakukan pemerintah China untuk menindak ini. Padahal, tidak hanya

tindakan, tetapi royalti juga harus dikumpulkan dan dibayarkan kepada pemilik hak cipta AS.

Terdapat sekitar 2.100 sistem TV *cable* di China, untuk melayani sekitar 70 juta keluarga, dan ditambah dengan 1.000 *cable* di daerah terpencil, yang hampir setiap waktunya (rutin) memasukkan film-film bajakan dalam programnya acaranya.

- Pembajakan melalui internet

Pembajakan yang juga marak di China adalah pembajakan melalui layanan internet. Modus pembajakan yang dilakukan adalah dengan men-*download* ilegal melalui internet. Beberapa situs internet menawarkan *videogames*, *file* MP3 untuk *download* lagu, serta jurnal tanpa izin pemilik hak cipta. Kemudahan yang ditawarkan oleh fasilitas internet, membuat orang nyaman untuk men-*download* dan tidak menyadari kalau tindakannya melanggar hukum. Besarnya animo pasar pengguna internet di China pun dapat dilihat dari besarnya jumlah pengguna fasilitas ini dengan peningkatan setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2001, diperkirakan ada 33,7 juta pengguna internet di China. Di tahun 2002, ada 58 juta pengguna, dan angka ini terus meningkat hingga tahun 2004 China dikenal sebagai negara pengguna internet terbesar di dunia, yaitu 94 juta pengguna.

Dari banyaknya pengguna internet, yang paling banyak dibajak melalui adalah *videogame*. 25% *game* kini di *download* dari internet. Hingga tahun 2002 terdapat 4,5 juta pengguna internet di China yang biasanya bergantung pada *café* internet, di mana kebanyakan *game* bajakan di *download*. Ini sangat disayangkan mengingat pemerintah bertindak cukup keras dalam memerangi pornografi dengan meminta seluruh *café* internet di China memiliki sistem *blocking* untuk situs yang mengandung isi pornografi, tetapi tindakan tegas tidak dilakukan pada pembajakan *videogame* di *café* internet.¹⁶² Hingga tahun 2007 terdapat sekitar

¹⁶² IIPA's 2003 Special 301 Country Report on the People's Republic of China, *op. cit.*, hal 24.

110.000 *café* internet yang memiliki izin, dan dalam jumlah yang sama juga pada *café* yang tidak memiliki izin.

Penerbit buku dan jurnal juga mengalami penderitaan yang sama melalui pembajakan dari internet. Kini, dengan kecanggihan sistem internet, siapapun dapat *men-download* versi PDF yang di *scan* dari buku-buku akademik, buku *bestseller*, jurnal, ataupun buku-buku khusus seperti perdagangan dan medis.¹⁶³

Oleh karena itulah, AS mendorong China untuk ikut WIPO *Internet Treaties* demi meningkatkan infrastruktur hukum yang efektif untuk melindungi isi internet, dan yang pada intinya melawan *online piracy*.¹⁶⁴ China juga harus memperhatikan aturan bagi tindak pembajakan melalui internet, agar ancaman baru ini tidak menjadi parah seperti pembajakan cakram optik yang dimulai pada pertengahan tahun 1990-an dan berlanjut hingga saat ini.

3.3 Upaya Pemerintah China Dalam Perlindungan Hak Cipta

Sejak pertengahan tahun 1990-an, pemerintah China telah berupaya untuk menata ulang peraturan perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam negaranya. Pemerintah sadar bahwa untuk membuat kondisi dan situasi yang aman bagi para penanam modal asing maka ia harus membuat peraturan yang dapat mendukung perlindungan akan kekayaan intelektual. Setelah hukum hak cipta disusun dan terus disempurnakan, kini pemerintah China pun memperkuat aturannya dengan mendirikan beberapa institusi perlindungan hak cipta, mulai dari pengadilan, instansi administratif, dan departemen fungsional lainnya.¹⁶⁵ Misalnya saja di Juni 1993,¹⁶⁶ pemerintah mendirikan Pengadilan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan pengadilan pertama yang mengurus kasus-kasus atas kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Sejak itu, secara berkala pengadilan

¹⁶³ IIPA 2004 *Special 301 Country Report on the People's Republic of China*, hal 193. Diakses dari <http://www.iipa.com/rbc/2004/2004SPEC301PRC.pdf>, (waktu akses 26 Maret 2009, pukul 20.07 WIB).

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Mark Lam dan John L. Graham, *op. cit.*, hal 343.

¹⁶⁶ *Ibid.* hal 344.

kekayaan intelektual didirikan di beberapa provinsi, di kota-kota besar China, dan di daerah *Special Economic Zones*.¹⁶⁷

Selain itu, pemerintah juga mendirikan departemen fungsional *General Administration of Customs* (selanjutnya dalam tesis ini disebut GAC) yang menjalin kerjasama internasional dalam pelaksanaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menjaga kelangsungan perdagangan dari tindakan pembajakan dan penyeludupan.¹⁶⁸

Untuk urusan administratif, pemerintah China membentuk *National Copyrights Administration* yang merupakan agen administratif pemerintah untuk menangani permasalahan hak cipta, termasuk masalah administrasi hak cipta asing dan yang memiliki wewenang dalam penerimaan hak cipta asing, serta mengawasi seluruh departemen administrasi lokal hak cipta.¹⁶⁹

Di China, penegakan terhadap kasus-kasus hak cipta dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, administrasi, sipil, dan proses kriminal.¹⁷⁰ NCA dapat melakukan langkah-langkah administrasi untuk menjatuhkan denda, ataupun menyita barang-barang pembajakan. Proses pengadilan dapat dilakukan jika pemilik hak cipta memiliki bukti bahwa ada pihak lain yang melakukan tindakan pembajakan. Sehingga tahapan selanjutnya adalah, pemilik hak cipta dapat membawa tuntutananya kepada pengadilan setempat untuk tindakan kriminal.

Upaya nyata yang dilakukan aparat pemerintah China tiap tahunnya adalah melakukan operasi razia terhadap produk-produk bajakan. Pada tabel 3.6 berikut ini adalah beberapa contoh serangkaian razia yang dilakukan oleh aparat setempat China terhadap produk-produk bajakan.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.* hal 351.

¹⁷⁰ *Ibid.* hal 352.

Tabel 3.6
Serangkaian Razia Produk Bajakan Yang Dilakukan Aparat Pemerintah
China 2001-2007

No.	Tahun	Keterangan
1.	2001	Untuk produk-produk berbasis cakram optik misalnya, dilakukan sekitar 20.000 razia dan disita 6 pabrik CD yang tidak memiliki ijin, 1 jalur produksi DVD, 1 jalur produksi VCD, 4 jalur replikasi DVD, serta 9 jalur replikasi CD. Hasilnya, sekitar 51 juta keeping CD, VCD, dan CD-ROM, serta 4,9 juta keping DVD.
2.	2001	MoC mengeluarkan tata tertib administratif di awal 2001 yang diperuntukkan bagi penjualan produk audiovisual. Hasilnya, 232 pasar ditutup di tahun 2001 dan hingga tahun 2002, ada 277 pasar yang ditutup di beberapa kota besar.
3.	2001	<i>An Hui Cable TV, Hunan Zhuzou Cable TV, Chengdu Cable TV</i> telah ditindak, namun sayangnya mereka hanya diberi peringatan oleh <i>Radio, Film & Televison Bureau</i> lokal, mereka tidak dikenakan denda ataupun pencabutan ijin siaran. Lalu pada ahun 2002, penindakan dilakukan pada <i>Hangzhou Cable TV</i> .
3.	2002	Aparat melakukan razia pada pabrik yang memiliki ijin ataupun tidak, dan menyita 25 jalur produksi, dengan 12 jalur DVD, 13 jalur VCD dan CD.
4.	April 2002	Pusat penjualan <i>Yongsheng Century AV Center</i> di Beijing dirazia, dan DVD, VCD, CD musik bajakan disita dalam jumlah besar. Pusat penjualan ini telah beberapa kali menghadapi keluhan dari industri hak cipta terkait. Kali ini pemilik dituntut karena menjalankan bisnis yang ilegal, dan pada Oktober 2002 dituntut penjara 5-6 tahun. Aksi ini cukup baik dalam mengantisipasi pelanggaran lainnya.
5.	Agustus 2002	Aparat melakukan razia di pabrik elektronik di

		Guangzhou, di mana ditemukan dalam jumlah besar sirkuit <i>game boy</i> bajakan.
6.	2002	Dilakukan sekitar 20.000 razia, dan menyita lebih dari 75,8 juta VCD, CD, CD-ROM, serta 7,96 juta DVD. Penyeludupan dari luar China daratan juga terus berlangsung, lebih dari 30 juta unit (dari 75,8 juta unit) disita dari 7 daerah perbatasan. Kemudian NAPPWG merevisi, bahwa di tahun 2002 mereka menyita sekitar 115 juta cakram bajakan. NAPPWG menahan 6400 pelanggaran tahun 2002 dan menahan 23 jalur produksi.
7.	2002	Salah satu pusat distribusi di Beijing disita berikut dengan 312.000 cakram optik bajakan, termasuk 35.000 DVD bajakan, 65.000 VCD bajakan.
8.	Oktober 2002	Pusat distribusi lain juga di razia, dan 77.000 DVD disita.
9.	Januari 2003	Razia di propinsi Guangdong terjaring 300.000 <i>game</i> palsu.
10.	2003	NAPPWG menahan sedikitnya 6400 pelanggaran hak cipta dan menyita setidaknya produk-produk dari 23 jalur produksi ilegal. Dari tindakan tersebut, disita sekitar 49,5 juta keping cakram optik, angka ini menurun dari tahun sebelumnya disebabkan adanya wabah SARS yang menghambat razia. Sejak adanya <i>Enforcement Action Plan</i> antara AS dengan China tahun 1996, NAPPWG setidaknya telah menindak 180 jalur produksi cakram optik.
11.	Oktober 2003	Disita sekitar 24 jalur pembajakan dan 180 jalur produksi baik yang terdaftar maupun tidak.
12.	27 Juli 2004	GAPP melakukan razia pada pasa sebuah pabrik VCD yang memiliki izin. Pabrik ini punya 7 jalur dan telah memproduksi banyak produk bajakan dari tahun 1998-2004. Pabrik ini diperintahkan untuk menutup operasinya dari bulan Juli-September 2004 saja dan terkena denda hanya 9.666 dolar AS.
13.	2004	NAPPWG menyita 165 juta keping cakram di pasaran domestik saja, dengan total

		keseluruhan produk bajakan adalah 244 juta keping.
14.	2004	Razia di Shengyang, disita lebih dari 3.000 CD, dikenakan denda hanya 3.625 dolar AS, itu berarti hanya 1 dolar lebih per CD.
15.	2005	<i>The Chinese Administrative Authorities</i> dan <i>Technical Supervision Bureau</i> mengadakan razia terhadap 10 pabrik, 21 gudang, dan 5 toko ritel. 1 kasus berhasil dituntut tindak pidana di akhir 2005. Tetapi terdakwa melarikan diri keluar kota, sehingga tindak pidana ditangguhkan.
16.	2006	Dilakukan sekitar 24 razia ke pabrik, gudang, ataupun workshop di propinsi Guangdong, disita lebih dari 800.000 produk Nintendo palsu. Banyak dari kasus ini yang sebenarnya telah melewati ambang batas China, tetapi tidak ada tindakan hukum dari aparat yang berwenang.
17.	2006	Sepanjang tahun 2006, penerbit bekerjasama dengan GAPP, NCA, MoE untuk menangani pembajakan yang merajalela di pusat buku ataupun universitas. Selama 6 bulan terakhir tahun 2006, 3 agen tersebut bertindak yang tidak pernah dilakukan sebelumnya pada masalah pembajakan buku, yaitu dengan menindak pelaku yang melakukan aktivitas meng-copy <i>textbook</i> di Hubei, Beijing, Shanghai, dan Guangdong. Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari keluhan dari para industri. Termasuk tindakan investigasi di beberapa universitas ternama. Hasil dari tindakan ini adalah keputusan hukuman ataupun denda.
18.	Maret-April 2007	Dilakukan razia pada pusat buku universitas di Chengdu. April 2007, otoritas kota Sichuan memberi penalti pada <i>University of Science and Technology</i> di Chengdu dengan denda 6.954 dolar AS dan menyita produk2 bajakan.

Sumber: Data telah diolah kembali dari *IIPA 2002-2008 Special 301 Report: People's Republic of China*. Diakses dari <http://www.iipa.com>. (waktu akses 27 Maret 2009, pukul 11.15 WIB).

Untuk mendukung tindakan di atas, China seharusnya menindak lanjuti dan mengambil langkah efektif dengan mempublikasikan secara meluas tentang aksi melawan pabrik-pabrik pembajakan produk AS untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat China dan kepada pembajak bahwa tindak pembajakan tidak akan ditoleransi.

Tindakan pemberantasan pembajakan hak cipta yang dilakukan aparat pemerintah China menunjukkan setidaknya niat dan itikad baik pemerintah untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dan beberapa kota di China telah menunjukkan upaya perbaikan yaitu di Shanghai, Beijing, dan Guangzhou. Namun di sisi lain, upaya tersebut hanya mampu memberikan sedikit efek bagi keseluruhan tingkat pembajakan di negaranya. Hal ini sangat memungkinkan mengingat kompleksitas dan mengarkannya masalah pembajakan yang terjadi di China. Tingkat pembajakan terhadap produk-produk berhak cipta AS yang tetap tinggi di China memberi dampak cukup serius bagi *wealth-power* AS sebagai pihak yang dirugikan. Besarnya kerugian yang dialami AS akan dibahas pada subbab berikut.

3.4 Kerugian Ekonomi AS Akibat Pembajakan Hak Cipta Produk AS Oleh China Periode 2001-2007

Ketika negara merupakan aktor utama dalam ekonomi, maka itu berarti bahwa aktifitas ekonomi haruslah sesuai dan bertujuan untuk mencapai kepentingan dan pembangunan negara. AS adalah negara dengan industri hak cipta yang maju dan terus berinovasi. Hampir setiap karya hak cipta yang lahir berhasil masuk dan merajai pasaran dunia. Hal ini menjadi penting bagi *wealth* dan *power* AS, sehingga menjadi penting pula untuk melindungi setiap industri hak ciptanya dari ancaman gerusan pembajakan. Ketika industrinya terancam, maka AS memiliki dorongan yang kuat untuk mengambil tindakan demi menyelamatkan nilai-nilai dan kepentingan negaranya. Industri hak cipta AS sangat penting bagi pengumpulan *power*-nya, dan juga sebaliknya, *power* AS muncul sebagai alat untuk perlindungan *wealth*. Industri hak cipta dan segala upaya untuk melindunginya dari ancaman pembajakan merupakan fokus dari AS

dalam kelangsungan hidup negaranya. Untuk itu, penting bagi AS untuk menjaga *wealth* dan *power* secara simultan.

AS merupakan negara yang paling dirugikan atas aksi pelanggaran hak cipta yang selama ini dilakukan oleh rakyat China sehingga negara yang paling berupaya keras dalam penanganan masalah pelanggaran hak cipta di China adalah AS. Hal itu dikarenakan kerugian moril dan materil yang diderita AS akibat kecurangan China tidaklah sedikit tiap tahunnya.¹⁷¹

Industri berbasis hak cipta memiliki arti penting bagi perekonomian AS karena ia merupakan sektor dengan pertumbuhan yang sangat cepat serta sebagai sektor utama dalam ekspor. Kontribusi industri tersebut cukup memberi pengaruh bagi GDP, perdagangan, dan lapangan pekerjaan di AS. Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh IIPA menunjukkan bahwa untuk tahun 2001 saja, industri *core copyrights* menyumbangkan 5,24% GDP AS atau sekitar 535 milyar dolar AS.¹⁷² Di tahun 2004 GDP AS adalah 11,7 triliun dolar AS, dan industri *core copyrights* berhasil menyumbangkan 760,49 milyar dolar AS atau sekitar 6,48% dari GDP AS.¹⁷³ Sedangkan untuk industri *total copyrights* menyumbangkan sekitar 1,3 triliun dolar AS atau sekitar 11,09% GDP AS. Industri *core copyrights* pun setidaknya mampu menyerap 5,48 juta pekerja dalam 25 tahun terakhir (1977-2002) atau sekitar 4% dari total lapangan pekerjaan di AS, dan 11,548 juta pekerja untuk industri *total copyrights*.¹⁷⁴

Tahun 2002 tercatat nilai ekspor produk hak cipta dari industri *core copyrights* saja sebesar 89,26 milyar dolar AS.¹⁷⁵ Itu berarti nilai ekspor produk-produk berhak cipta lebih tinggi dari sektor industri lainnya, seperti kimia, *automobile*, baik suku cadang maupun aksesoris, serta industri pesawat. Perbandingan antar sektor tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini.

¹⁷¹ Diakses dari www.detiknet.com, (waktu akses tanggal 19 Agustus 2008, pukul 22.14 WIB).

¹⁷² IIPA 2003 Special 301 Report: People's Republic of China, *op. cit.*, hal 2.

¹⁷³ Stephen Siwek. *Copyrights Industries in the US Economy: The 2006 Report*. Hal 6. Diakses dari http://www.iipa.com/pdf/2006_siwek_full.pdf, (waktu akses 28 Maret 2009, pukul 13.14 WIB).

¹⁷⁴ IIPA 2005 Special 301 Report: People's Republic of China, *op. cit.*, hal 2.

¹⁷⁵ *Ibid.*

Tabel 3.7
Ekspor/ Foreign Sales Beberapa Industri AS Tahun 2002

Industri	Ekspor/ <i>foreign sales</i> 2002
Industri <i>core copyrights</i>	89,26 milyar dolar AS
Kimia dan terkait lainnya	83,59 milyar dolar AS
Makanan dan hewan	40,30 milyar dolar AS
Kendaraan bermotor, suku cadang dan aksesoris	50,36 milyar dolar AS
Pesawat dan peralatan	43,88 milyar dolar AS

Sumber: Data telah diolah kembali dari *Copyrights Industries in the US Economy: The 2004 Report*, diakses dari http://www.iipa.com/pdf/2006_siwek_full.pdf, (waktu akses 28 Maret 2009, 07.40 WIB).

Oleh karena itu, keputusan pemerintah AS untuk memperkarakan pelanggaran hak cipta produk AS oleh China ke DSB WTO, pada dasarnya karena merasa kepentingan ekonomi khususnya industri nasionalnya terganggu yang pada akhirnya membuat *wealth-power* AS menurun karena kerugian yang terus dideritanya. Terganggunya kepentingan industri nasional AS dapat dilihat melalui pernyataan yang keluar dari pihak industri hak cipta AS sebagai reaksi terhadap keputusan pemerintah AS memperkarakan pelanggaran hak cipta China yang berkepanjangan ini ke DSB WTO.

Pada tanggal 9 April 2007, reaksi/ tanggapan positif keluar dari kalangan industri hak cipta AS. Dan Glickman, ketua MPA menyatakan kepuasannya dan menganggap langkah ke penyelesaian sengketa WTO adalah langkah yang sangat logis dalam mendorong kemajuan penyelesaian masalah dengan China. Akses pasar yang adil dan penghormatan kekayaan intelektual terhadap negara lain merupakan kondisi dasar bagi keanggotaan dalam komunitas global di mana China telah berkomitmen di dalamnya saat China menjadi anggota WTO. Jadi menurutnya, tindakan ini merupakan tindakan yang adil, tepat waktu, dan sebagaimana mestinya.¹⁷⁶

Reaksi yang sama juga ditunjukkan oleh asosiasi penerbit AS/ AAP, yang menyatakan bahwa pembajakan hak cipta di China terhadap produk AS telah

¹⁷⁶ *US to Complain to WTO Regarding PR China's Failure to Protect IPR*. Diakses dari <http://www.techlawjournal.com/topstories/2007/20070409.asp>, (waktu akses 6 Mei 2009, pukul 12.26 WIB).

menjadi endemis dan China telah gagal untuk memenuhi komitmennya sebagai anggota WTO.¹⁷⁷

Dari keterangan di atas, jelas terlihat betapa pentingnya industri berbasis hak cipta bagi *wealth-power* AS khususnya bagi kepentingan ekonomi AS karena berpengaruh pada profit, ekspor, dan lapangan pekerjaan. Oleh karenanya, menjadi penting pula bagi AS untuk memberikan perlindungan bagi industri tersebut dalam menghadapi dunia perdagangan yang semakin kompetitif. Namun sayang, perkembangan teknologi yang semakin canggih dan terbuka di era globalisasi saat ini, membuat produk-produk AS dari industri berbasis hak cipta tak luput dari eksekusi negatifnya.

Di samping itu, perhatian pemerintah AS yang tinggi kepada industri berbasis teknologi sehingga perlu didukung dengan adanya hak kekayaan intelektual dapat dilihat dari besarnya *budget* tahunan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan R&D. Tercatat untuk tahun 2004 saja, pemerintah menyiapkan *budget* sebesar 123 milyar dolar AS untuk investasi R&D atau naik 7% dari tahun 2003.¹⁷⁸ Pemerintah memahami pentingnya proses R&D sebagai senjata untuk perkembangan teknologi masa depan. Dari total *budget* tersebut, pemerintah menyisihkan 5% nya atau sebesar lebih dari 27 milyar dolar AS untuk penelitian dasar yang mencakup *Networking and Information Technology Research and Development*, nanoteknologi, iptek untuk memberantas terorisme, meningkatkan investasi pada teknologi informasi, memicu investasi swasta pada R&D dan perlindungan kekayaan intelektual.¹⁷⁹

Oleh sebab itu, aksi pembajakan secara umum sangatlah mempengaruhi kepentingan industri nasional AS, di mana pada tahun 2002 secara global diperkirakan mengalami kerugian sebesar 20-22 milyar dolar AS. Untuk industri hak cipta saja mengalami kerugian hingga 9,2 milyar dolar AS, dan diperkirakan lebih dari 1,8 milyar dolar AS (20%) di tahun 2002 merupakan kerugian untuk

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah AS untuk R&D pada tahun 2003 adalah sebesar 118,120 milyar dolar AS, dengan 54,413 milyar dolar AS untuk R&D di bidang *non defense*. Diambil dari <http://www.aaas.org/spp/rd/03ptbi1.pdf>, (waktu akses 24 April 2009, pukul 16.00 WIB).

¹⁷⁹ *Promoting Innovation*. Diakses dari http://www.ostp.gov/pdf/fy06promotinginnovation1_pager.pdf, (waktu akses 24 April 2009, pukul 15.16 WIB).

China sendiri, dan ini merupakan jumlah yang sangat besar untuk hanya satu wilayah saja.¹⁸⁰ Padahal berdasarkan IIPA, estimasi pendapatan secara umum yang harusnya didapat dari ekspor global produk hak cipta AS pada tahun 2001 adalah sebesar 88,28 milyar dolar AS.¹⁸¹ Tingginya tingkat pembajakan produk-produk hak cipta AS di China sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, memberikan dampak negatif berupa kerugian ekonomi yang cukup mengganggu industri AS. Kerugian yang ditimbulkan atas aksi pembajakan produk-produk hak cipta di China mencakup produk film, aplikasi perangkat lunak bisnis, rekaman musik, perangkat lunak hiburan, dan buku/ jurnal dari tahun 2001 hingga 2007 akan diuraikan sebagai berikut.

Sebagai negara yang produk hak ciptanya diunggulkan dan mendominasi hampir di seluruh dunia, mulai dari film, lagu, buku, hingga perangkat lunak, maka sangat mungkin jika banyak oknum yang ingin memanfaatkan hal tersebut dengan membuat produk tiruannya. Dengan jangkauan yang mendunia, bukan tidak mungkin jika produk tiruannya pun merajalela di mana-mana. China, sebagai negara yang banyak melakukan pembajakan terhadap produk hak cipta AS, memberi eksekusi negatif berupa kerugian yang tidak sedikit yang dialami AS setiap tahunnya. Misalnya saja, film-film produksi AS diputar hampir di seluruh dunia, termasuk China. Tetapi, daya beli masyarakat yang tidak merata di seluruh dunia untuk menonton di bioskop ataupun membeli kepingan cakram optik yang asli, serta teknologi yang semakin canggih dan sederhana untuk dioperasikan, memberi celah akan pembajakan produk film tersebut. Tabel 3.8 berikut menunjukkan kerugian yang dialami AS menurut bidangnya dan kerugian total tiap tahunnya yang merupakan akumulasi dari kerugian tiap bidang dari kurun waktu 2001 hingga 2007.¹⁸²

¹⁸⁰ *IIPA 2003 Special 301 Report: People's Republic of China, op. cit.*, hal 15.

¹⁸¹ Dengan perincian, estimasi pendapatan ekspor global industri film 14,69 milyar dolar AS, industri perangkat lunak (baik itu bisnis ataupun hiburan) 60,74 milyar dolar AS, industri rekaman dan musik 8,91 milyar dolar AS, industri penerbit 3,93 milyar dolar AS. Diambil dari Stephen Siwek. *op. cit.*, (2004). Hal 15.

¹⁸² Kerugian industri hak cipta AS oleh karena pembajakan China berupa estimasi karena angka kerugian yang dimaksud bukanlah kerugian pendapatan atas biaya yang dihabiskan untuk sebuah produk ataupun jumlah produk asli yang laku di pasaran dan yang tidak laku, melainkan kerugian atas hasil harga jual dikalikan dengan perkiraan pengguna produk bajakan.

Tabel 3.8

**Estimasi Kerugian Industri Hak Cipta AS Atas Pembajakan Produk Hak Cipta AS Oleh China Tahun 2001-2007
(dalam juta dolar AS)**

Tahun Industri	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Film	160	168	178	280	244	NA	NA
Aplikasi perangkat lunak bisnis	1140,2	1637,3	1787	1488	1554	2172	2472
Perangkat lunak hiburan	455	NA	568,2	510	589,9	NA	NA
Rekaman & Musik	47	48	286	202,9	204	206	451,2
Buku/ jurnal	130	40	40	50	52	52	52
TOTAL	1932,2	1893,3	2859,2	2530,9	2643,9	2430	2975,2

Sumber: Data telah diolah kembali dari *IIPA 2002-2008 Special 301 Report: People's Republic of China*. Diakses dari <http://www.iipa.com>. (waktu akses 27 Maret 2009, pukul 11.15 WIB).

Dari tabel 3.8 di atas, maka uraian tentang besarnya kerugian yang dialami industri hak cipta AS, khususnya industri film, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak hiburan, rekaman dan musik, serta buku/ jurnal, akibat pembajakan yang dilakukan oleh China akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Industri Film

Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki industri film yang sangat maju dan kenyataan bahwa hampir seluruh negara di dunia memutar film produksi AS, khususnya Hollywood, menjadikan film-film produksi AS tersebut sebagai sasaran empuk bagi para pembajak untuk melakukan penggandaan secara ilegal.

Penghitungan kerugian yang dialami industri film AS ini dihitung berdasarkan jumlah produk film asli yang terjual di satu negara tiap tahunnya, kemudian dikurangi dengan perkiraan jumlah total produk film yang terjual tiap tahunnya, hasilnya akan diperoleh perkiraan jumlah produk film bajakan yang terjual tiap tahunnya di satu negara. Lalu, hasil tersebut dikalikan dengan

persentase produk film bajakan yang telah terjual. Hasil akhir yang dicapai berupa perkiraan besarnya kerugian tiap tahunnya dalam satu negara karena pembajakan.¹⁸³

Praktik pembajakan film di China yang menimpa jenis format DVD sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis DVD, sehingga kondisi iklim bisnis yang tidak sehat tersebut turut mengancam kelangsungan investasi para perusahaan film AS di China. Hal ini masih ditambah dengan harga eceran film-film palsu dalam berbagai format yang sangat murah, sehingga dapat menghancurkan pasaran film-film asli ataupun penjualan tiket bioskop yang selisih harganya cukup jauh.¹⁸⁴ Bagi sebagian besar masyarakat China merasa lebih baik membeli film versi bajakan walau kualitas tidak sama dengan film versi asli, karena dengan harga film versi asli mereka dapat membeli beberapa film versi bajakan. Untuk tahun 2001 saja, terdapat sekitar 900 judul film AS yang telah dikeluarkan versi bajakannya di China, dan pada tahun 2002 ada sekitar 967 judul, di mana hal ini mempengaruhi iklim investasi industri film di China.

Di tahun 2003, kerugian yang diderita oleh industri film AS mencapai kerugian tertinggi senilai 178 juta dolar, kerugian ini merupakan kerugian tertinggi yang diderita sejak tahun 1995, bersamaan dengan tingkat pembajakan tertinggi yang pernah dialami sejak tahun 1996 yaitu 95%.

Pembajakan VCD dan DVD ini pun ternyata tak hanya merugikan pihak produsen film tersebut, tetapi juga memberi dampak negatif bagi para produsen VCD *player* dan DVD *player*. Produsen-produsen alat operasionalisasi VCD dan DVD besar seperti Sony, Philips, dan lainnya harus ikut terkena imbas, karena produk canggih yang mereka hasilkan ternyata belum tentu dapat memutar VCD/ DVD bajakan, sehingga produsen lokal pun berinisiatif untuk membuat *player* yang lebih terjangkau dan pasti dapat digunakan untuk VCD/ DVD bajakan sekalipun.¹⁸⁵ Meningkatnya pembajakan VCD dan DVD juga telah mendorong tingkat penggunaan VCD/ DVD *player*, di tahun 2002 tercatat ada 55 juta

¹⁸³ Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007spec301methodology.pdf>, *op. cit.*

¹⁸⁴ Untuk setiap tiket yang terjual, 46% hasil penjualan diperuntukkan bagi China Film yang menguasai distribusi film impor/ ekspor. Dari 46% tersebut, hanya 13-17% yang ditujukan bagi perusahaan Hollywood. Sedangkan 54% sisanya ditujukan bagi perusahaan lokal yang menangani distribusi di masing-masing wilayah.

¹⁸⁵ Shujen Wang, *op. cit.*

pengguna VCD *player* dan 5,3 juta pengguna DVD *player* di China yang rata-rata dijual seharga 43 dolar AS. Penggunaanya pun terus meningkat hingga pada tahun 2002, jumlah VCD dan DVD *player* di China mencapai 84,4 juta.

Di samping itu, industri film AS juga terkena efek dari maraknya pembajakan melalui internet dengan banyaknya film-film produksi AS yang dibajak melalui internet. Oleh karena itu, atas dorongan industri film AS, hingga 4 Desember 2002, telah ditutup sekitar 225 *situs* bajakan.¹⁸⁶

2. Perangkat Lunak Bisnis

Aksi pembajakan aplikasi perangkat lunak bisnis pun tak kalah merugikan dengan pembajakan film. Sebagaimana diketahui, keberadaan mesin tik manual yang dulu terasa sangat membantu, mulai kehilangan manfaat besarnya ketika komputer diperkenalkan ke masyarakat. Saat ini dapat dikatakan kalau ketergantungan orang terhadap komputer sangatlah tinggi. Penggunaan, kecanggihan dan hasil yang terasa nyata lebih baik dari mesin tik manual, membuat hampir seluruh masyarakat beralih pada komputer. Namun sayangnya, ketergantungan masyarakat akan komputer tidak dibarengi dengan ketergantungan mereka pada penggunaan perangkat lunak yang asli. Penjualan komputer yang tiap tahunnya semakin tinggi di China, justru menjadi celah bagi maraknya penggunaan aplikasi perangkat lunak bajakan.

Walau dari segi persentase tingkat pembajakan China terhadap perangkat lunak mengalami penurunan, tetapi kerugian yang diderita masih sangat tinggi.¹⁸⁷ Ini dimungkinkan terjadi karena berbagai upaya pemerintah China untuk menggalakkan penggunaan perangkat lunak resmi di seluruh kantor-kantor pemerintahan telah dilaksanakan bahkan sebelum China masuk keanggotaan

¹⁸⁶ Situs-situs bajakan di China memperoleh pemasukan dari iklan, jadi walau materi hak cipta diberikan gratis kepada konsumen, mereka tetap mendapat untung dari iklan. Diambil dari *IIPA 2006 Special 301 Report on People's Republic of China, op. cit.*

¹⁸⁷ Hal tersebut diperparah lagi dengan keadaan bahwa industri perangkat lunak AS, Microsoft misalnya, kerap melakukan investasi R&D yang cukup besar di China. ini terbukti dengan adanya *Microsoft China Research & Development*, yang merupakan bagian dari *Strategic Partnership Group* antara Microsoft dengan Microsoft China yang didirikan pada September 2003. Kelompok R&D ini berupaya untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan lingkungan teknologi informasi China melalui berbagai cara seperti *outsourcing* perangkat lunak, informasi lisensi kekayaan intelektual, dan lainnya. Pengeluaran total Microsoft untuk R&D tahun 2003 diperkirakan sebesar 4,66 milyar dolar AS. Diambil dari <http://www.microsoft.com/china/CRD/spg/en/default.mspx>, (waktu akses 24 April 2009, pukul 15.8 WIB).

WTO, dan setelah China masuk keanggotaan WTO.¹⁸⁸ Namun sayangnya, upaya yang sama tidak gencar dijalankan pada sektor swasta, padahal pembajakan paling besar berada pada sektor ini. Oleh karena itulah, walau tingkat pembajakan turun, kerugian yang dialami masih tetap tinggi.

Penghitungan besarnya kerugian yang dialami oleh industri perangkat lunak bisnis dilakukan dengan cara mengurangi besarnya kerugian penjualan akibat pembajakan dengan rasio perangkat lunak yang dirimkan langsung dari AS yang mewakili permintaan/ *demand*.¹⁸⁹

3. Perangkat Lunak Hiburan

Tingkat pembajakan terhadap aplikasi perangkat lunak bisnis yang cukup tinggi di China memberi dampak kerugian yang tak kalah tinggi bagi AS, dan tiap tahunnya meningkat hingga mengalami kerugian paling tinggi dibanding industri hak cipta lainnya. Hal ini juga mempengaruhi penghasilan industri AS untuk penjualan ke luar negeri hingga kehilangan milyaran dolar AS disebabkan oleh aksi penyeludupan perangkat lunak bajakan China ke negara lain.¹⁹⁰

Penghitungan besarnya kerugian yang dialami oleh industri perangkat lunak hiburan dilakukan dengan cara memperhitungkan kerugian rata-rata yang dialami oleh penghasil perangkat lunak, penerbit, distributor, dan penjual.¹⁹¹

Kerugian yang dialami AS karena pembajakan perangkat lunak hiburan juga relatif tinggi. Perusahaan Sony Playstation misalnya menghadapi masalah pembajakan yang cukup tinggi. CD *game* bajakan dijual dengan harga 85 sen hingga 3 dolar AS, sedangkan harga CD *game* aslinya mencapai 20 dolar AS (harga ini merupakan harga jual untuk wilayah China, yang lebih rendah dari harga jual di AS sendiri). Di samping itu, pembajakan juga merugikan produsen mesin *console*, di mana mesin yang palsu/ tidak sah berisi *chips* yang dapat

¹⁸⁸ Februari 1999, *State Council* mengeluarkan kembali 'notice' yang dibuat oleh NCA Agustus 1995, untuk memerintahkan seluruh kementerian negara pada tiap tingkatan untuk menggunakan perangkat lunak asli saja. Pada 27 Juni 2000, *State Council* mengeluarkan 'Document No.18', yang berisi tentang pelarangan menggunakan perangkat lunak bajakan baik sektor pemerintah ataupun swasta. Pada tahun 2000, BSA bekerjasama dengan NCA untuk mengadakan *training* dan seminar untuk pemerintah dan beberapa perusahaan, dan upaya inipun terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Pada tanggal 28 Agustus 2001, NCA, MoF, MII dan *State Development and Planning Committee* mengeluarkan ketetapan "Notice On Governmental Organizations As Role Models By Using Legal Software".

¹⁸⁹ Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007spec301methodology.pdf>, *op. cit.*

¹⁹⁰ *IIPA 2005 Special 301 Report on People's Republic of China*, *op. cit.*, hal 192.

¹⁹¹ Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007spec301methodology.pdf>, *op. cit.*

menerima CD bajakan. Mesin palsu tersebut dijual seharga 180 dolar AS, jauh di bawah harga mesin asli yaitu 240 dolar AS.¹⁹²

4. Industri Rekaman dan Musik

Hampir serupa dengan film, AS bisa dikatakan merajai produksi musik/lagu yang dikenal hampir di seluruh dunia, tak terkecuali China. Hampir serupa dengan produk film juga, produk rekaman dan musik AS tak luput dari pembajakan sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Penghitungan besarnya kerugian yang dialami oleh industri rekaman dan musik dilakukan dengan cara pengumpulan data dari survey pasar di tiap daerah yang mencakup besarnya penjualan produk asli dan tingginya peredaran produk bajakan.¹⁹³

Di tahun 2002, total kerugian industri musik China dan internasional (termasuk AS) di China adalah 600 juta dolar AS, dengan kerugian yang dialami AS saja sebesar 48 juta dolar. Kerugian di tahun berikutnya meningkat tajam menjadi 268 juta dolar AS. Hal ini terjadi karena maraknya pembajakan yang menggunakan fasilitas internet.

Selain pembajakan *videogame*, internet biasa digunakan untuk membajak lagu dalam bentuk MP3. Sejak tahun 2002, pembajakan lagu melalui internet memperparah kerugian yang dialami oleh industri rekaman. Industri musik AS memperkirakan ada 7 juta file lagu yang dapat di *download* dari ribuan *website* musik bajakan di China. Beberapa situs bahkan menawarkan layanan *download* untuk telepon genggam, di mana terdapat lebih dari 200 juta pengguna telepon genggam di China. Namun untungnya, pelanggaran ini tidak berlarut-larut setelah ada dorongan industri musik AS kepada pemerintah China tentang pelanggaran internet.

5. Industri Penerbit Buku dan Jurnal

Penghitungan yang dilakukan untuk menggambarkan kerugian yang dialami oleh industri penerbitan adalah dengan mengumpulkan data dari perwakilan lokal penerbit di satu negara. Data tersebut diperoleh dari perkiraan ketersediaan buku bajakan, khususnya yang terdapat di sekitar institusi pendidikan, toko buku, dan kios buku. Keterbatasan yang dialami oleh penerbit

¹⁹² IIPA's 2004 Special 301 Country Report on the People's Republic of China, *op. cit.*, hal 35.

¹⁹³ Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007spec301methodology.pdf>, *op. cit.*

buku untuk menghitung kerugian yang dialami adalah sulitnya mencari data buku/ terbitan bajakan yang diperuntukkan bagi konsumsi pribadi atau tidak diperjual belikan yang biasanya merupakan dilakukan dengan cara fotokopi. Perkiraan kerugian dihitung berdasarkan jumlah rata-rata harga produk bajakan yang biasanya dijual di bawah harga produk asli.¹⁹⁴

Pada tabel 3.8 di atas, dapat dilihat adanya penurunan angka yang cukup signifikan pada kerugian yang diakibatkan dari pembajakan buku ataupun jurnal. Hal ini terjadi karena upaya kelompok penerbit AS untuk mengingatkan dan mendorong pemerintah China melalui surat yang dikirimkannya tentang isu pembajakan jurnal. Pada tanggal 14 Agustus 2001, Presiden *Association of American Publishe, Inc* (selanjutnya dalam tesis ini disebut AAP), Patricia Schroeder mengirim surat kepada Wakil PM China Li Lanqing, untuk memperhatikan masalah pembajakan jurnal yang terjadi di China, yang diperkirakan merugikan hingga lebih dari 100 juta dolar AS per tahun. Tindakan ini menghasilkan sebuah peringatan dan pernyataan khusus dari Wakil PM China bahwa pembajakan jurnal merupakan suatu kesalahan dan harus dihentikan dalam waktu singkat. Hasilnya, Oktober 2001, pembajak jurnal terbesar, Guanghai, mengumumkan kepada para konsumennya bahwa pihaknya tidak lagi dapat menyediakan jurnal bajakan. Bahkan praktik Guanghai ditutup pada Desember 2001. Hal inipun ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada perpustakaan-perpustakaan, universitas, dan institusi penelitian untuk menghentikan praktik pembajakan jurnal atau berhenti berlangganan jurnal bajakan. GAPP menyebarkan peringatan kepada seluruh perpustakaan dengan "*With Immediate Effect, Circulation Of Unauthorized Journal Copies is Prohibited*". Namun sangat disayangkan, perbaikan akan penanganan pembajakan jurnal tidak dibarengi dengan penanganan pembajakan buku ataupun materi lainnya, sehingga kerugian terus dialami oleh penerbit AS, khususnya penerbit buku pendidikan dan buku cerita.

Kerugian yang tinggi yang dialami penerbit AS di tahun 2001 adalah 130 juta dolar AS, dan jumlah ini turun di tahun berikutnya dengan turunnya pembajakan jurnal. Tahun 2003, pelanggan jurnal resmi sudah mulai banyak. IIPA

¹⁹⁴ Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007spec301methodology.pdf>, *op. cit.*

dan AAP menghargai pemerintah China atas langkah yang telah diambilnya, karena tindakan ini tentunya akan memberi dampak positif bagi penghormatan hak cipta jurnal dan mendorong investasi asing, sehingga menguntungkan para ilmuwan, akademis, dan pelajar China.

Berbagai pelanggaran hak cipta oleh China terhadap produk-produk AS tersebut diatas telah menyebabkan kerugian bagi AS. Kerugian yang diderita AS disebabkan karena terjadi penurunan penjualan yang signifikan bagi produk-produk AS seperti film, musik dan rekaman, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak hiburan, buku/ jurnal/ terbitan lainnya yang membuat penurunan bagi pendapatan AS hingga membuat kesejahteraan AS menurun. Selain itu, upaya pembajakan yang mem-*bypass* proses R&D bernilai jutaan dolar membuat keunggulan AS dalam kemajuan teknologi dan inovasi menjadi mampu disaingi oleh China. Kedua hal tersebut membuat terjadi penurunan dalam *wealth & power* yang dimiliki AS karena keunggulan industri, teknologi dan inovasi akibat tindakan pembajakan China atas produk AS. Padahal, keuntungan akibat keunggulan-keunggulan AS tersebut telah mendatangkan keuntungan yang memberikan *wealth* bagi AS. *Wealth* AS yaitu keunggulan industri, teknologi dan inovasi AS merupakan alat yang esensial bagi *power* AS yang menjadikannya negara industri maju sekaligus negara *superpower*.

3.5 Tuntutan Industri AS Atas Pembajakan Produk Hak Cipta Oleh China

Dalam menghadapi masalah pembajakan yang merajalela di China, tak jarang industri AS melayangkan berbagai tuntutan kepada pihak berwenang China, dengan harapan akan adanya tindakan keras yang dilakukan aparat China. Berikut ini adalah beberapa contoh keluhan dan tuntutan yang diajukan industri AS kepada pihak terkait China atas aksi pembajakan yang marak dari tahun 2001 hingga tahun 2007.¹⁹⁵

1. Tahun 2001, industri rekaman mengajukan 40 kasus, 26 diantaranya menghasilkan keputusan pengadilan bagi pemilik hak cipta dan pabrik yang terlibat, perusahaan distribusi, dan penjual.

¹⁹⁵ IIPA 2002-2008 *Special 301 Report: People's Republic of China, op. cit.*

2. Tahun 2001, industri perangkat lunak mengajukan 2 kasus.
3. Tahun 2001, Microsoft menang di pengadilan Shanghai atas perusahaan komputer China yang menggunakan perangkat lunak palsu pada *hard disk*-nya. Perusahaan itu didenda 33.735 dolar AS dan dituntut surat permintaan maaf. Namun begitu, denda tidaklah cukup mengobati biaya hukum dan pengeluaran lainnya, apalagi kompensasi untuk kerugian bisnisnya.
4. Tahun 2003, terdapat 30 kasus film di Beijing dan Shanghai, dengan 80% di Beijing.
5. Desember 2000, *Educational Testing Service* (ETS) mengajukan tuntutan kepada *Beijing New Oriental School*, yang selama bertahun-tahun mengadakan ujian TOEFL dan GRE bagi murid China yang ingin belajar di universitas AS. ETS menuduh sekolah tersebut mencuri soal ETS dan menjual kepada murid-murid dengan mengambil keuntungan yang cukup tinggi. Sekolah ini juga mendistribusikan soal ini hampir ke seluruh China. Hal ini juga merugikan ETS, karena pihak universitas AS jadi meragukan keaslian hasil ujian murid China (10% dari 800.000 pelajar yang mengambil tes TOEFL di seluruh dunia, berasal dari China). Pada September 2003, *Beijing Intermediate Court* menjatuhkan hukuman kepada sekolah tersebut.
6. November 2005, industri rekaman AS mengajukan keluhannya kepada NCA terhadap 120 situs musik ilegal dan pada pertengahan Januari 2006, setidaknya terdapat 24 situs yang ditutup.
7. Satu kasus yang ditangani oleh PSB yang merupakan kasus pelanggaran melalui internet adalah kasus Jin Hu Dong terkait izinnya atas lebih dari 1000 film, termasuk 600 judul film yang dimiliki oleh industri film AS. Keuntungan yang diperoleh Jin sekitar 1.4 juta dolar AS telah memenuhi ambang batas tindak pidana. Untuk itu industri film AS mengajukan tuntutan kepada NCA pada Desember 2005.

8. Perusahaan rekaman internasional menuntut *Baidu* sebagai situs terbesar yang menyediakan file lagu bajakan, dan *yahoo! China* untuk pelanggaran hak cipta.
9. Industri rekaman bersama NCA mengajukan keluhannya kepada 44 situs di tahun 2006. 29 diantaranya telah ditutup, 1 kasus ditangani oleh *Beijing Copyright Bureau*, dan 6 kasus ditangani oleh *National Anti Piracy and Pornography Working Committee*.
10. September-Desember 2006, industri film mengajukan 7 keluhan. Hasilnya, 4 situs patuh, 2 situs aktif kembali pada 9 Februari 2007, itu bukti lemahnya penegakan di China.
11. Tahun 2007, selama kampanye melawan pembajakan internet, MPA mengajukan 40 keluhan.
12. 413 tuntutan administratif diajukan oleh industri rekaman kepada pemerintah China di tahun 2007. 124 tuntutan kepada NCA, 221 tuntutan kepada NAPPWG, 68 tuntutan kepada MoC, terhadap situs-situs ataupun media lainnya yang menyediakan layanan *download* ilegal. Namun hanya 77 dari 413 situs yang di tutup sejauh ini.
13. Industri film mengirim peringatan penutupan kepada 74 situs, dan tingkat pemenuhannya mencapai sekitar 67%. 6 situs diawasi, 3 ditutup, 18 menghapus isi situs yang melanggar, 2 alih bidang, sedangkan yang lainnya ditemukan secara berkala pindah server dari satu kota ke kota lainnya.

Walau telah banyak upaya dari pemerintah China yang menekankan bahwa pelaksanaan tindak pidana merupakan hal yang penting bagi sistem penegakan hukumnya, kenyataannya pembajakan hak cipta masih dipandang sebagian besar pengambil keputusan pemerintah sebagai masalah yang harus ditangani secara administratif saja dibanding tindak pidana. Pada tanggal 11 Januari 2007, pemerintah China mengeluarkan '*Opinions On Strengthening All Respective Work On Intellectual Property Trials To Provide Judicial Safeguard For Building An Innovation-Oriented State*'. Namun hanya 1 dari 26 bagian dokumen ini yang membahas tentang pelaksanaan pidana dan menghimbau pengadilan tingkat rendah untuk memperlakukan pembajakan sebagai tindak

kejahatan yang penting. China dapat dikatakan masih belum memenuhi janjinya di JCCT untuk meningkatkan tuntutan pidana untuk pembajakan hak cipta.

IIPA beserta anggotanya menyatakan bahwa hanya ada 6 kasus menyangkut produk AS yang berhasil dibawa China ke tindak pidana sejak tahun 2001, yaitu 3 kasus di tahun 2005 dan 3 kasus lainnya di tahun 2006. Padahal IIPA telah mengidentifikasi setidaknya ada 82 kasus sejak tahun 2001 yang menyangkut tindak pidana. Kasus itu menyangkut produk AS berikut:¹⁹⁶

- 17 September 2006, Xiamen, produk rekaman dan musik *online* produksi AS.
- 20 Desember 2006, Beijing, versi mandarin bajakan buku Jiang Zemin.
- Desember 2006, Tianjin, produk perangkat lunak MS SQL 2000.
- Awal tahun 2005, Beijing, perangkat lunak AS.
- 19 April 2005, Shanghai, produk film AS dan DVD.
- 12 Agustus 2005, Chongqing, produk film AS.

Padahal, jika pemerintah lebih '*fair*' dan penindakan pidana berhasil dibawa oleh pemerintah, itu tidak hanya sesuai dengan US-China MoU dan *Action Plan*, tetapi juga dengan aturan TRIPS.

Dari data tingkat pembajakan, besarnya kerugian, upaya yang telah dilakukan pemerintah China maupun pemerintah AS, serta upaya kerjasama antar kedua negara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala pelanggaran yang ada telah mengganggu kestabilan *wealth* AS yang diderita oleh industri hak ciptanya. Untuk itulah, demi melindungi industrinya, pemerintah AS pun menggunakan *powernya* secara tegas untuk menekan kekakuan pemerintah China dalam menangani masalah pembajakan hak cipta terhadap produk AS yang sudah mengakar, dengan mengambil jalur penyelesaian sengketa pada *Dispute Settlement Body* WTO untuk menyelesaikan masalah ini.

Dari analisis di atas terlihat jelas bahwa AS, khususnya industri hak cipta AS mengalami kerugian yang tidak sedikit setiap tahunnya, bahkan kerugian tersebut mempengaruhi hubungan dagang antara AS dengan China. Berbagai

¹⁹⁶ *Ibid.*

upaya untuk melindungi industri hak cipta telah dilakukan AS baik itu dalam kerangka antar pemerintah ataupun antar industri.

Kekecewaan dan kerugian yang menumpuk di pihak AS, membuat AS merasa perlu menindak tegas China dengan memperkarakan masalah perlindungan dan akses pasar bagi produk hak cipta AS ke *Dispute Settlement Body* WTO.

Berbagai upaya yang dilakukan AS baik melalui kebijakan *Special 301*, mengajukan keluhan dan proses khusus ke WTO menyangkut transparansi China dalam memberikan informasi seputar penanganan pembajakan produk hak cipta AS pada tahun 2005, maupun dengan bekerjasama dengan China untuk mengatasi pembajakan, merupakan usaha demi mencapai tujuan untuk melindungi *wealth & power* AS. Tindakan AS yang kemudian membawa masalah pelanggaran hak cipta produk AS oleh China ke *Dispute Settlement Body* WTO merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan jangka panjang AS ke depan sekaligus demi memberikan jaminan kesejahteraan dalam jangka panjang, dan agar *wealth & power* AS yang berasal dari industri, keunggulan teknologi dan inovasi dalam R&D dapat terjaga.